

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KERUMUTAN
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

LARA PRAMESWARI

NPM : 177310172

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Lara Prameswari
NPM : 177310172
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan
Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penulisan Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Pekanbaru, 26 Januari 2021

Pembimbing

Andriyus., S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Lara Prameswari
NPM : 177310172
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 9 Juni 2021

Ketua,


Andriyus, S.Sos., M.Si

Sekretaris,


Nina Yulaini, S.IP., M.Si

Anggota


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

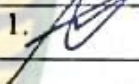
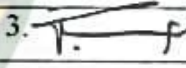
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 24 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 Maret 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Lara Prameswari
NPM : 177310172
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.*

Nilai Ujian : Angka : "79,8" ; Huruf : "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yusraini, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Mauliadih, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 01 April 2021

An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Lara Prameswari
N P M : 177310172
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Implementasi Program KArtu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.*

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nina Yusraini, S.IP., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Sri Mauliadih, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 30' Maret 2021
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lara Prameswari
NPM : 177310172
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten
Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 9 Juni 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Andriyus, S.Sos., M.Si

Nina Yulsaini, S.IP., M.Si

Mengerahui
Wakil Dekan Bidang Akademik

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan”**. Untuk memenuhi salah satu syarat guna gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islasm Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan

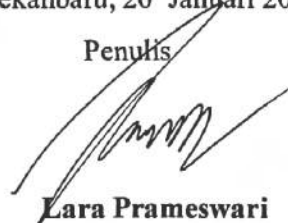
ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

4. Bapak Andriyus.,S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Teristimewa Penulis haturkan kepada Ayahanda Asrial Husin S.Pd Ibunda Wirda Hasim kakak Ela Pramestuti S.Pd dan Abang T. Said Herizon yang telah melimpahkan kasih sayang, *support* moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada Penulis.
6. Kepada sahabat saya, Dewi Wahyuni, Putri Andriani, Kakak Sinta Marsella, dan Adhe Fadli Farhan yang selalu menemani penulis serta memberi *support* yang tiada hentinya.
7. Kepada teman seangkatan, kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang membantu penulis dan memberi *support* tiada hentinya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, 26 Januari 2021

Penulis



Lara Prameswari

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	 21
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Konsep Pemerintahan.....	21
2. Konsep Kebijakan.....	25
3. Konsep Implementasi.....	27
4. Konsep Implementasi Kebijakan.....	30
5. Konsep Model Implementasi Kebijakan.....	32
6. Konsep Kebijakan Pendidikan	38
7. Konsep Program Indonesia Pintar	42
B. Penelitian Terdahulu	50
C. Kerangka Pikir	51
D. Konsep Operasional Variabel	52
E. Operasional Variabel.....	55
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 56

A. Tipe Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Informan Penelitian	57
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian	58
E. Jenis dan Sumber Data	58
F. Teknik Pengumpulan Data	58
G. Teknik Analisis Data.....	59
H. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian	60
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	62
A. Sejarah ringkas sekolah menengah pertama negeri 4 kerumutan kabupaten pelalawan	62
B. Visi misi Sekolah menengah pertama negeri 4 kerumutan	63
C. Tujuan sekolah menengah pertama negeri 4 kerumutan	64
D. Sumber daya.....	65
E. Kondisi siswa.....	65
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Deskripsi Key Informan dan Informan	67
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.....	69
1. Standar dan sasaran kebijakan.....	70
2. Sumber daya	77
3. Karakteristik organisasi pelaksana	85
4. Komunikasi antar organisasi	92
5. Disposisi sikap para pelaksana	99
6. Lingkungan sosial,ekonomi dan politik	106
C. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi program kartu Indonesia pintar di sekolah menengah pertama negeri 4 kerumutan kabupaten pelalawan	113

BAB VI : PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Daftar satuan pendidikan di kabupaten pelalawan	16
I.2 Daftar SMP sederajat di Kecamatan Kerumutan	17
I.3 Daftar siswa yang kurang mampu di SMP Negeri 4 Kerumutan	18
I.4 Daftar siswa penerima KIP Di SMP Negeri 4 Kerumutan	19
II.2 Operasional Variabel Penelitian Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan	76
III.3 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Penelitian Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan	82
IV.1 sumber daya manusia di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan kabupaten pelalawan	86
IV.2 kondisi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan tahun 2019/2020	87
V.1 Identitas <i>key Informan</i> dan <i>Informan</i>	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Kerangka Pikir Program Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 4 Kerumutan	



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lara Prameswari
NPM : 177310172
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pematasan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2021
Pclaku Pernyataan,



Lara Prameswari

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK

LARA PRAMESWARI

Dalam pemerataan pendidikan pemerintah meluncurkan program pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk menekan angka putus sekolah agar semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan dan untuk melihat faktor-faktor penghambat pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan. penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Akibat minimnya sosialisasi yang diakibatkan masih ada siswa yang kurang paham maksud dari program KIP dan juga cara mendapatkan KIP tersebut dan terdapatnya siswa yang menggunakan uang KIP untuk keperluan atau membeli barang diluar dari kebutuhan sekolah. Metode Penelitian ini yaitu kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori Van Metter and Van horn Indikator yang menjadi pengukur dalam penelitian ini standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. informannya yaitu wakil kepala kesiswaan, bendahara sekolah, siswa penerima KIP dan siswa yang tidak Menerima KIP, UPTD Kerumutan key informan Operator sekolah. Adapun hasil penelitian ini bahwa implementasi program KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan belum efektif. Karena kurang meratanya KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan, masih ada siswa yang kurang mampu yang belum menerima KIP serta kurangnya sosialisasi sehingga mengakibatkan adanya siswa yang kurang paham maksud dari KIP dan juga cara dan syarat mendapatkan KIP tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Indonesia Pintar, Sekolah Menengah Pertama

IMPLEMENTATION OF THE SMART INDONESIA CARD PROGRAM IN THE FIRST 4 STATE MIDDLE SCHOOL OF THE 4 KERUMUTAN, PELALAWAN DISTRICT

ABSTRACT

LARA PRAMESWARI

In equal distribution of education, the government conducts an educational program, namely the Smart Indonesia Program (PIP) which is distributed through the Smart Indonesia Card (KIP) which aims to reduce the dropout rate so that all children have the right to get a proper education in accordance with the Regulation of the Minister of Education Number 12 of 2015 concerning the Indonesian Program Smart. The purpose of this research is to see the implementation of KIP in Junior High School 4 Kerumutan Pelalawan Regency and to see the factors inhibiting the implementation of the Smart Indonesia Card in Junior High School 4 Kerumutan Pelalawan Regenc This research was conducted in Junior High School 4 Kerumutan Pelalawan Regency. As a result of the lack of socialization, there are still students who do not understand the meaning of the KIP program and also how to get the KIP and there are students who use KIP money for necessities or buy goods outside of school needs. This research method is qualitative. The theory used is the theory of Van Metter and Van horn. The indicators that measure in this study are policy standards and objectives, resources, characteristics of the implementing organization, communication between organizations, the position of the attitudes of the implementers, the social, economic and political environment. The information is the deputy head. students, school treasurers, students who receive KIP and students who do not receive KIP, UPTD Kerumutan key informants School operators. The results of this study indicate that the implementation of the KIP program at SMP Negeri 4 Kerumutan has not been effective. Due to the inequality of KIP in SMP Negeri 4 Kerumutan, there are still underprivileged students who have not received KIP and lack of socialization, resulting in students who do not understand the meaning of KIP and also the ways and requirements for obtaining the KIP.

Keywords: *Implementation, Smart Indonesia Card, Junior High School*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Negara maju pendidikan merupakan aspek yang terpenting. Suatu Negara maju atau mundur di ukur dari grafik pendidikannya. Selain untuk memajukan negara, pendidikan juga berguna untuk diri sendiri sehingga pendidikan tidak boleh dianggap sebelah mata atau disepelekan lagi saat ini. Selain untuk memajukan negara, pendidikan juga berguna untuk diri sendiri sehingga pendidikan tidak boleh dianggap sebelah mata atau disepelekan lagi saat ini. Memasuki era modern seperti sekarang, Indonesia sudah harus bisa menghasilkan masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki wawasan yang luas untuk menghadapi yang akan terjadi di masa depan, karena jika Indonesia tidak dapat bersaing dengan Negara asing akan mengakibatkan Negara Indonesia tidak dapat mengambil peran dalam bidang apapun. Seperti halnya jika pendidikan Indonesia belum di maksimalkan dan belum merata akan banyak masyarakat yang masih belum bisa bersaing dengan Negara luar atau dengan Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia, karena kemampuan dari WNA tersebut pasti diatas rata-rata masyarakat yang ada dan hal itu disebabkan karena negara luar sudah mempersiapkan dari jauh hari agar pendidikan di Negara nya merata dan menghasilkan masyarakat yang dapat bersaing dengan Negara mana pun.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat menyebutkan salah satu cita-cita Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sejak awal

masalah pendidikan sudah sangat dipikirkan agar dapat membawa Indonesia lebih maju.

Untuk menunaikan amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah provinsi dan provinsi dibagi dalam kabupaten/kota.

Untuk menjamin kedudukan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut menekankan pada daerah supaya mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Berdasarkan pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut ialah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren ialah urusan pemerintahan yang dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pemerintahan umum ialah urusan pemerintahan yang diwewangi oleh presiden secara utuh.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari

1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan dan kawasan (permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindung masyarakat), Sosial.

2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu: Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengadilan penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kepemudahan dan olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan, Kearsipan.

Berdasarkan Undang-undang diatas, maka masalah Pendidikan termasuk dalam urusan wajib yang merupakan dengan Pelayanan dasar. selanjutnya asas penyelenggaraan yaitu digunakan untuk mencapai sasaran pemerataan pendidikan salah satunya menggunakan asas dekonsentrasi yang dimana pelimpahan wewenang dan pemerintahan pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat daerah di daerah agar kebijakan tersebut terimplementasikan dengan baik.

Agar terciptanya kondisi pemerintahan yang baik maka dibutuhkan pelimpahan dan pembagian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat 3 wewenang dalam

sistem pemerintahannya yakni asas sentralisasi, asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Yang dimaksud asas sentralisasi ialah penyerahan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah pusat. Sedangkan asas desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk tercapainya pemerintahan yang efisien. Dan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat ke pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Jadi di bidang pendidikan merupakan dari asas penyelenggaraan desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pendidikan adalah suatu hal yang terpenting didalam kehidupan kita. Sebagai mana yang di bunyikan dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan juga sanberguna untuk diri sendiri sehingga pendidikan tidak boleh disepelekan lagi saat ini sampai kedepannya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting yang mana sesuai dengan amanat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang menyatakan setiap rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Permasalahan pendidikan sangat penting untuk diselesaikan. Dengan pendidikan yang merata tentu dapat menekan angka anak putus sekolah. Dalam mengupayakan pendidikan pemerintah telah menyiapkan program yang digunakan masyarakat yang kurang mampu seperti pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membebaskan biaya operasional pendidikan. Pada tahun 2009 pemerintah juga mengeluarkan program bantuan siswa miskin (BSM).

Dan pemerintahan mengeluarkan program terbaru pada 3 november tahun 2014 dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan keluarga sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Dan program terbaru dalam bidang pendidikan ialah program Indonesia pintar yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Program Indonesia Pintar ialah bantuan uang tunai yang diberikan pemerintah kepada peserta didik yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tujuan PIP terdiri dari : meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun dalam mendapatkan layanan pendidikan menengah wajib belajar 12 tahun menahan peserta didik putus sekolah akibat kesulitan ekonomi; menaik siswa ptus sekolah untuk mendapatkan kembali layanan pendidikan.

Adapun sasaran PIP adalah anak berusia 6 sampai 21 tahun yang kriterianya terdiri dari : anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan; anak yang berstatus yatim atau piatu dari panti sosial maupun panti asuhan; anak yang tidak bersekolah diharapkan kembali bersekolah; anak yang terkena dampak ekonomi bencana alam; anak dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terancam putus sekolah.

Kemudian didalam buku saku PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2018 besar Dana yang dapat di terima bagi peserta didik berdasarkan jenjang pendidikanny:

1. SD/SDLB/Paket A:

- a. Kelas I, II, III, VI, dan V untuk dua semester.
- b. Kelas VI semester genap sebesar Rp225.000,00 untuk satu semester
- c. Kelas I semester ganjil sebesar Rp225.000,00 untuk satu semester
- d. Kelas II,III, IV, V, dan VI semester ganjil sebesar Rp450.000,00 untuk dua semester
- e. Paket A sebesar Rp450.000,00 untuk dua semester

2. SMP/SMPLB/Paket B:

- a. Kelas VII dan VIII semester genap sebesar Rp750.000,00 untuk dua semester
- b. Kelas IX semester genap sebesar Rp375.000,00 untuk satu semester
- c. Kelas VII semester ganjil sebesar Rp375.000,00 untuk satu semester

- d. Kelas VIII dan IX semester ganjil sebesar Rp375.000,00 untuk dua semester
- e. Paket B sebesar Rp750.000,00 untuk dua semester

3. SMA/SMALB/Paket C:

- a. Kelas X dan XI semester genap sebesar Rp1.000.000,00 untuk dua semester
- b. Kelas XII semester genap sebesar Rp500.000,00 untuk satu semester
- c. Kelas X semester ganjil sebesar Rp500.000,00 untuk satu semester
- d. Kelas XI dan XII semester ganjil sebesar Rp1.000.000,00 untuk dua semester
- e. Paket C sebesar Rp1.000.000,00 untuk dua semester.

4. SMK/SMKLB:

1. Program 3 Tahun

- a. Kelas X dan XI semester genap sebesar Rp 1.000.000,00 untuk dua semester
- b. Kelas XII semester genap sebesar Rp500.000,00 untuk satu semester
- c. Kelas X semester ganjil sebesar Rp500.000,00 untuk satu semester
- d. Kelas XI dan XII semester ganjil sebesar RP1.000.000,00 untuk dua semester

2. Program 4 Tahun

- a. Kelas X, XI, dan XII semester genap sebesar Rp.1.000.000,00 untuk dua semester
- b. Kelas XIII semester genap sebesar Rp500.000,00 untuk satu semester
- c. Kelas X semester ganjil sebesar Rp500.000,00 untuk satu semester

- d. Kelas XI, XII, dan XIII semester ganjil sebesar Rp1.000.000,00 untuk dua semester

Dalam suatu penyaluran dana Program Indonesia Pintar, pengambilan suatu dana dilaksanakn oleh yang menerima bantuan atau dari peserta didik di bank atau lembaga penyalur degan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekening tabungan.

Peserta didik harus mengaktifkan rekening tabungan sebelum melaksanakan pencairan dana tersebut dengan membawa Surat Ketentuan (SK) dari kepala sekolah atau ketua lembaga dan identitas pengenalan Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Pelajar atau Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Siswa SD dan SMP yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat di damping langsung oleh orang tua atau wali atau guru atau kepala sekolah sehingga aktivitas pencairan dana PIP dapat langsung diterima oleh yang menerima. Kemudian pengambilan dana PIP dapat dilakukan dengan cara:

1. Langsung diambil oleh peserta didik dengan membawa syarat dokumen pendukung seperti KIP, kartu pelajar, KTP, KK atau surat keterangan Kepala Desa/ Lurah.
2. Dapat juga dilakukan pengambilan secara kolektif oleh kepala sekolah/kepala lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung, yaitu:
 1. Surat kuasa dari orang tua atau wali atau peserta didik penerima Program Indonesia Pintar.
 2. Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM).
 3. Surat keterangan dari kepala sekolah atau ketua lembaga.

4. Fotokopi KTP kepala sekolah atau ketua lembaga serta melampirkan yang asliya.
5. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah atau ketua lembaga yang masih berlaku serta melampirkan yang aslinya.
6. Buku tabungan peserta didik penerima Program Indonesia Pintar yang diambil secara kolektif.

2. Virtual Account

Membawa surat keterangan kepala sekolah atau ketua lembaga dan didampingi oleh kepala sekolah atau guru atau orang tua atau wali maka bisa dilakukan pengabilan langsung oleh peserta didik. Kemudian pengambilan secara kolektif dapat dilakukan bila terpenuhinya salah satu syarat atau kondisi sebagai berikut:

1. Kondisi yang sulit untuk penerima PIP mengakses ke bank/lembaga penyaluran, seperti:
 - a. Kantor Bank/lembaga penyalur tidak ada kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik.
 - b. Kondisi geografis menyulitkan seperti daerah pedalaman, kepulauan, dan pegunungan
 - c. Waktu tempuh dan jarak yang relative jauh
2. Kondisi tempat tinggal yang di daerah transportasi sulit, seperti
 - a. biaya transportasi yang rekativ besar
 - b. terbatasnya armada trasportasi

3. Tidak memungkinkannya penerima PIP mengambil dana secara langsung seperti:

- a. Sedang praktik kerja lapangan(PKL)
- b. Sedang sakit
- c. Terdampak bencana alam atau bencana buruk
- d. Hambatan lainnya yang tidak terduga.

Kartu Indonesia Pintar bisa didapatkan dalam dua cara. Yang pertama, menggunakan usulan satuan pendidikan. Yang kedua, melalui pemadanan Basis Data Terpadu dengan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).

A. Usulan Satuan Pendidikan adalah:

1. Satuan pendidikan mengusulkan data calon penerima KIP kepada dinas pendidikan (SD dan SMP ke dinas pendidikan kabupaten/pelalawan SMA, SMK dan PKLK ke dinas pendidikan provinsi)
2. Dinas pendidikan melakukan validasi usulan pendidikan berdasarkan status kelayakan peserta didik sesuai dengan prioritas sasaran penerima KIP
3. Dinas pendidikan mengirimkan sebuah hasil validasi kepada kemendikbud melalui direktorat teknis sebagai rekomendasi.

4. Selanjutnya Direktorat teknis terkait untuk melakukan penyaringan akhir pada kelengkapan data rekomendasi untuk ditetapkan sebagaimana penerima KIP.
5. Kuasa pengguna anggaran menerbitkan SK daftar nama peserta didik penerima KIP.

B. Pemuktakhiran Basis Data Terpadu (BDT)

Kemensos menyerahkan data peserta didik yang tercatat didalam BDT kepada Kemendikbud untuk dipandankan dengan Dapodikdasmen. Hasil pemadanan ini menjadi dasar penerbitan SK daftar penerima KIP oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dalam hal ini adalah Direktur Pembinaan SD, SMP, SMA, SMK dan PKLK.

Didalam PIP terdapat jenis program kegiatan yaitu KIP. Program KIP diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan UU No 12 Tahun 2015 tentang program Indonesia pintar. Dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, sebagaimana yang dibunyikan pada pasal 1 ayat 3 yaitu Kartu Indonesia Pintar yang selanjut disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana PIP.

Berlandaskan pada tujuan PIP yang disebut pada pasal 4 ayat 2 dalam peraturan menteri no 12 tahun 2015 PIP Bertujuan menahan peserta didik dari

perkiraan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi , maka Program KIP ini sendiri ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Selain menghindari anak putus sekolah, program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah.

Dalam suatu peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 9 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis Program Indonesia Pintar dalam pasal 4 disebutkan :

1. Program Indonesia Pintar diperuntukan bagi Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar.
2. Peserta Didik penerima Kartu Indonesia Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kuasa pengguna Anggaran (KPA) Pada direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan
3. Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercantum pada:
 - a. Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan sosial
 - b. Data sejenis lainnya yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.
4. Peserta didik penerima KIP yang tercantum dalam Data sejenis lainnya . Data sejenis lainnya yang berasal dari usulan satuan pendidikan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diprioritas bagi:

- a. Peserta Didik yang berstatus yatim dan/ atau piatu termasuk yang yang berada di panti sosial atau panti asuhan
- b. Peserta Didik berkebutuhan khusus pada sekolah regular
- c. Peserta Didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan
- d. Peserta Didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan
- e. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
- f. Peserta Didik korban musibah di daerah konflik
- g. Peserta Didik Paket A, B, dan C pada sanggar kegiatan Belajar (SKB) dan pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

5. Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima KIP Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diprioritaskan bagi yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, seni karawitan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran dan pelayaran/kemaritiman.

Kartu Indonesia Pintar sangat bermanfaat untuk anak yang ekonomi nya terbatas mereka dapat mempergunakan nya untuk membeli atau meperlengkapi kecukupan mereka selama masa pendidkan berlangsung. Dengan adanya Kartu Indosesia Pintar dapat mendorong pengikut sertaan anak usia sekolah yang putus sekolah di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. Kemudia KIP juga menjajikan untuk suatu kelanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

PIP adalah program pendidikan yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Program itu dirancang khusus untuk membantu anak dan keluarga tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan yang di tandai dengan KIP atau kartu Indonesia pintar. Bagaimana cara mendapatkan Kartu KIP Indonesia Pintar. Ada beberapa berkas yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan KIP,yaitu:

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Akta Kelahiran
3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau SKTM apabila tidak memiliki KKS
4. Rapor hasil belajar siswa
5. Surat pemberitahuan penerimaan BSM dari Kepala Sekolah/Madrasah.

Adapun mekanisme dan institusi yang terkait dalam program ini adalah pihak sekolah atau lembaga pendidikan ke dinas pendidikan setempat. Adapun cara pengajuan untuk mengikuti program ini ialah pihak sekolah atau lembaga pendidikan lain telah melakukan pelaporan ke dinas pendidikan setempat terkait data peserta didik yang memang membutuhkan bantuan dari program tersebut. Setelah itu barulah dinas pendidikan setempat memproses dan memverifikasi data-data tersebut untuk kemudian menerbitkan kartu Indonesia pintar (KIP) yang akan diserahkan kepada peserta didik.

KIP diperuntukkan untuk semua jenjang pendidikan, dalam penelitian ini, peneliti menempatkan pada tingkat SMP. di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan salah satu nya kecaamatan kerumutan. ada beberapa SMP sebagian di kelola pusat maupun swasta untuk lebih jelas dapat dilihat table berikut:

Tabel 1.1 daftar satuan pendidikan di kabupaten pelalawan

no	Kecamatan	Sd	smp	Sma	smk	total
1	Kec. Langgam	20	9	6	1	36
2	Kec. Pangkalan kurass	30	16	3	2	51
3	Kec. Bunut	15	4	3	1	23
4	Kec. Kuala Kampar	25	8	2	1	36
5	Kec. Pangkalan kerinci	29	19	9	5	62
6	Kec. Ukui	24	12	3	3	42
7	Kec. Pangkalan lesung	15	7	2	1	25
8	Kec. kerumutan	24	5	1	1	31
9	Kec. Pelalawan	15	8	2	0	25
10	Kec. Teluk merati	16	7	3	0	26
11	Kec. Bandar sei kijang	9	5	2	1	17
12	Kec. Bandar petalangan	13	4	1	1	19

Sumber: Data Referensi kementerian pendidika dan kebudayaan

Tabel: 1.2. Daftar SMP sederajat di kecamatan kerumutan

No	Tingkat Pendidikan	Status
1.	SMP NEGERI 1 KERUMUTAN	NEGERI
2.	SMP NEGERI 2 KERUMUTAN	NEGERI
3.	SMP NEGERI 3 KERUMUTAN	NEGERI
4.	SMP NEGERI 4 KERUMUTAN	NEGERI

5.	MTS AL- HIDAYAH	SWASTA
----	-----------------	--------

Sumber: Data Referensi kementerian pendidika dan kebudayaan

Pada salah satu sekolah tingkat SMP yang telah melaksanakan Program Kartu Indonesia Pintar yang di tandai dengan KIP adalah SMP 4 Kerumutan dengan jumlah siswa sebanyak 109 orang siswa/i pada tahun ajaran 2019/2020, kelas VII sebanyak 38 orang, kelas VIII sebanyak 42 orang dan kelas XI sebanyak 29 orang. Menurut info yang penulis dapat dari SMP 4 Kerumutan sendiri untuk Kuota KIP DI SMP Negeri 4 tidak dibatasi. Dan menurut Data yang penulis peroleh dari SMP Negeri 4 Kerumutan dengan Jumlah Siswa sebanyak 109 dari 109 tersebut siswa/i yang kurang mampu sebanyak 36 orang. Tetapi dari 36 orang yang terdata kurang mampu tersebut hanya 20 orang siswa yang mendapatkan KIP sehingga sebanyak 16 orang siswa tidak mampu, belum menerima KIP. Dan untuk lebih jelas nya lagi bisa di lihat pada table Berikut:

**Tabel: 1.3. Daftar Siswa yang kurang mampu di SMP Negeri 4
Kerumutan**

No	Nama	Jenis kelamin	Kelas	Pekerjaan orang tua
1.	Dika Andresaputra	L	7	Petani
2.	Intan Sri Delvian	L	7	Petani
3.	Lastri	p	7	Petani
4.	Mardiana Dwi Novitasari	p	7	Petani
5.	Radid	L	7	Petani
6.	Robi Wantolo	L	7	Petani
7.	Robildi	L	7	Petani
8.	Radit Saputra	L	7	Petani
9.	Rina Riana	P	7	Petani
10.	Rodiah	P	7	Petani
11.	Tiara	P	7	Petani
12.	Wahyu Mustika Rani	P	7	Petani
13.	Arianto	L	8	Petani

14.	Aleksa	P	8	Petani
15.	Aulia Gita Safitri	P	8	Buruh
16.	Elza Safira	P	8	Petani
17.	Farit	L	8	Petani
18.	Fauzan Azim	L	8	Petani
19.	Abdul Azari	L	9	Petani
20.	Pandi Ahmad	L	8	Wiraswasta
21.	Dodi Irawan	L	9	Perangkat Desa
22.	Reni	P	8	Petani
23.	Muhammad Juanda	L	9	Petani
24.	Sanjaya Priyogo	L	8	Petani
25.	Putri Kirana	P	9	Petani
26.	SapdSi Rosandi	L	8	Petani
27.	Rendi	L	9	Petani
28.	Sri Bintang Kurniawan	L	8	Petani
29.	Salima	P	9	Petani
30.	Teddy Riandyy	L	8	Petani
31.	Susi Angelia Saputri	P	9	Petani
32.	Devi	P	9	Petani
33.	Yudi Yansah	L	9	Petani
34.	Ahmad Yuda Setiawan	L	7	Petani
35.	Dewi Mulyani	P	9	Petani
36.	Kharisma Khapoor	P	7	Wiraswasta

Sumber: Operator SMP 4 Kerumutan

Menurut data yang diterima di SMP 4 Negeri Kerumutan dari 36 orang siswa yang kurang Mampu hanya 20 orang yang mendapatkan KIP. Dan yang tidak menrima KIP yaitu sebanyak 16 orang siswa Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama	Jenis kelamin	Kelas	Pekerjaan orang tua
1.	Mardiana Dwi Novitasari	P	7	Petani
2.	Robildi	L	7	Petani
3.	Radit	L	7	Petani
4.	Wahyu Mustika Rani	P	7	Petani
5.6.	Tiara	P	7	Petani
7.	Aleksa	P	8	Petani
8.	Fauzan Azim	L	8	Petani
9.	Pandi Ahmad	L	8	Wiraswasta
10.	Dodi Irawan	L	9	Perangkat Desa
11.	Sapdi Rosandi	L	8	Petani

12.	Sri bintang kurniawan	L	8	Petani
13.	Teddy Riandy	L	8	Petani
14.	Devi	P	9	Petani
15.	Ahmad yuda Setiawan	L	7	Petani
16.	Dewi Mulyani	P	9	Petani

Sumber: Operator SMP 4 Kerumutan

Tabel:1.4. Daftar Siswa Penerima KIP di SMP 4 Kerumutan

No	Nama	Jenis kelamin	Kelas	Pekerjaan orang tua
1.	Dika Andresaputra	L	7	Petani
2.	Intan Sri Delvia	P	7	Petani
3.	Lastri	P	7	Petani
4.	Radid	L	7	Petani
5.	Robi Wantolo	L	7	Petani
6.	Rina Riana	P	7	Petani
7.	Rodiah	P	7	Petani
8.	Arianto	L	8	Petani
9.	Aulia Gita Safitri	P	8	Petani
10.	Elza Safira	P	8	Petani
11.	Farit	L	8	Petani
12.	Abdul Azari	L	9	Petani
13.	Reni	P	8	Petani
14.	Muhammad Juanda	L	9	Petani
15.	Sanjaya Priyogo	L	8	Petani
16.	Putri Kirana	P	9	Petani
17.	Salima	P	9	Petani
18.	Susi Angelia Saputri	P	9	Petani
19.	Yudi Yansah	L	9	Petani
20.	Kharisma Khapoor	P	7	Petani

Sumber: Operator SMP 4 kerumutan

Secara umum implementasi KIP pada SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan belum terlaksanakan dengan baik dan berhasil. masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung di transfer ke rekening siswa. Dana tersebut yang mengelolah adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sehingga sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada saat penerimaan dana KIP orang tua siswa tidak mengelolanya

dengan baik sehingga, dana KIP menjadi tidak tepat sasaran karena digunakan untuk keperluan pribadi bukan sebagai keperluan pendidikan. Uang yang seharusnya diharuskan untuk kebutuhan sekolah seperti baju sekolah dan sebagainya malah dibeli ke kebutuhan pokok lainya seperti makanan, lauk pauk, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melalui Program Kartu Indonesia Pintar, namu realisasi pelaksanaan nya khusus nya Kabupaten Pelalawan di SMP Negeri 4 Kerumutan, nyatanya dilapangan belum terimplementasika dengan baik, masih adanya terdapat siswa yang kurang mampu yang belum mendapatkan KIP di SMP Negeri 4 tersebut dan masalah Sehingga terdapat beberapa Fenomena dalam Pelaksanaan KIP tersebut:

1. Terindikasi ada siswa yang kurang mampu tapi belum menerima KIP.
2. Terindikasi ada siswa yang pemegang KIP yang menyalah gunakan uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan”**

B. Rumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena /gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah “Bagaimana

Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan”?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Guna Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan masyarakat dalam program Kartu Indonesia Pintar khusus ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dan masyarakat khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus melaksanakan kewajibannya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam Penulisan Karya ilmiah atau sebuah penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan pedoman untuk memahami dan mengemukakan permasalahan penelitian agar tidak terjadinya suatu kesalahpahaman dalam penelitian. Selanjutnya untuk menunjang penelitian ini di lihat dari konsep teori yang menyangkut tentang penelitian yang akan di uraikan dalam penulisan ini.

1. Konsep Pemerintahan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Ndraha (2015:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya, kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, konsumen, yang tidak berdaya, dan sebagainya. Pada dasarnya, proses-proses itu kumulatif. Ndraha (2015:5)

Menurut syafiie (2011:8) pemerintahan ialah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena tidak sedikit pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu melakukan serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan dikarenakan memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, bersifat universal, sistematis dan spesifik. Jika dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan arti luas dan pemerintahan arti sempit, pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif) sedangkan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundangan-undangan (legislatif) dan yang melaksanakan (yudikatif).

Menurut Ndraha (2000:78-79) Pemerintah itu memiliki dua fungsi dasar yaitu yang pertama fungsi primer/ fungsi pelayanan, dan yang kedua fungsi sekunder/fungsi pemberdayaan. Fungsi primer itu yaitu fungsi pemerintahan sebagai provinder jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi. Sedangkan fungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa

yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih terlalu lemah dan tidak berdaya (powerless) serta termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarannya.

Menurut Ndraha, (1997:17) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Selanjutnya Ndraha mengemukakan bahwa pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 : 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Selanjutnya Dinas Daerah adalah unsure pelaksana pemerintahan daerah. Dinas kabupaten/Kota merupakan unsure pelaksana pemerintahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Nurcholis,2005 : 132)

Pada pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya yaitu urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Selanjutnya Dinas Daerah adalah unsure pelaksana pemerintahan daerah. Dinas kabupaten/Kota

merupakan unsure pelaksana pemerintahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Nurcholis,2005 : 132)

dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis dinas adalah memberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.

2. Konsep Kebijakan

Hermiono (2018:125) mengatakan bahwa setiap merumuskan kebijakan harus di pastikan bahwa kebijakan itu mengjangkau masa depan. Oleh sebab itu, pelaku kebijakan sering kali belum ada saat kebijakan di tetapkan. Sehingga dapat menyebabkan tidak tepat nya kebijakan itu sendiri karena belum jelasnya antisipasi tentang pengaruh timbal balik antara pelaku dan lingkunganya. Kebijakan dapat dimaknai dengan langkah tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh actor atau sejumlah actor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintahan,karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan public adalah: pertama, kebijakan public merupakan tindakan yang mengarah

pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan bias pula negative.

Menurut Friedrik (dalam Syafi'ie, 2005 : 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2007 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

3. Konsep Implementasi

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65) mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:124) mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

Selanjutnya menurut Lister (dalam Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Sedangkan menurut Horn (dalam Tahir, 2014:55) “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Selanjutnya pengertian implementasi menurut Ekawati (dalam Taufik dan Isril, 2013:136) menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok swasta dan publik untuk mencapai tujuan secara terus menerus berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian menurut Gordon (dalam Mulyadi, 2015:24) berpendapat bahwa implementasi itu berkaitan dengan kegiatan yang diarahkan dalam realisasi program.

Selanjutnya Widodo (dalam Syahida, 2014:10) menjelaskan implementasi merupakan penyediaan sarana dalam melaksanakan sebuah kebijakan agar mengakibatkan suatu dampak. Kemudian

Menurut Meter and Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan, bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati.

Kemudian menurut Salusu (dalam Tahir, 2014:55-56) menyatakan, “implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai

suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”.

Selanjutnya menurut Wahab (2008:140) implementasi ialah pelaksanaan kebijakan yang biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun juga bisa berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan penting atau keputusan badan peradilan.

Kemudian menurut Winarno(2010:149), tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang bertujuan memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Subarsono (2005:87) implentasi pelaksanaan adalah suatu kegiatan utama dari proses perencanaan kebijakan. Kebijakan yang tela disarankan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berahsil dalam implementasinya. Masih ada banyak variabel keberhasilan implemntasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi, implentasi suatu progam melibatkan pembuatan kebijakan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayan dan mengatur perilaku kelompok saran.

4. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno,2012:101-102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu alat administrasi

hukum yang mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerjasama dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya implemtasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) menyenutkan ada dua pilihan dalam mengimplementasikannya, yakni pengimplementasian dalam bentuk program dan pengimplementasian dari turunan kebijakan itu sendiri.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:128) merumuskan implementasi kebijakan seperti tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Menurut zaini dan Hafis (2015:50) secara etimologi, implementasi dapat dimaksud dengan suatu aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil, apabila dirangkaikan terhadap kebijakan public maka kata implementasi kebijakan public dapat di artikan dengan aktivitas penyelesaian dan disetujui dengan penggunaan saran atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi adalah tahap dari suatu kebijakan public yang sangat menentukan suatu keberhasilan kebijakan. Dengan Implementasi kebijakan pemerintah bisa melihat apakah suatu kebijakan telah berjalan baik atau tidak. Jika tidak adanya implementasi maka semua tahapan kebijakan yang sudah dirumuskan akan sia-sia Karena tidak dijalankan.

Selanjutnya pengertian implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Pressman dan Wildavsky (2012:20) ialah melaksanakan sebuah kebijakan yang mana bertujuan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

5.Konsep Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan publik yaitu suatu kerangka untuk melakukan analisis terhadap suatu proses implementasi kebijakan public. Model implementasi berisi variabel-variabel dan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dari kelengkapan proses implementasi kebijakan public. Berikut ini adalah beberapa model implementasi kebijakan public yang dikemukakan menurut para ahli:

A. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn Dalam Agustino(2016:133) disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya

3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya

finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

B. Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2006 : 149) mengatakan untuk menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan terdapat empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi

apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan).

2. Sumberdaya

Maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering terjadikesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksananya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, mungkin kegiatan

tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

C. Model Merilee S. Grindle Model Grindle (dalam Nugroho, 2006: 134) ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan”. Dalam model Grindle tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Pelaksana program, dan
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa

c. Kepatuhan dan daya tanggap.

6. Konsep Kebijakan Pendidikan

Dalam Tilaar dan Riant Nugroho (2012:16) menyatakan kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi seringkali tidak kita pahami sepenuhnya. Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-macam sehingga perlu ada kesepakatan terlebih dahulu dengan kedua istilah tersebut. Suatu kebijaksanaan lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan rasional. Bukan berarti bahwa suatu kebijaksanaan tidak mengandung unsur-unsur rasional. Barangkali faktor-faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau merupakan intuisi. Bagaimana dengan kebijakan pendidikan? Bukankah pendidikan itu sudah dikenal sejak manusia lahir ke dunia ini karena dia lahir dari seorang ibu yang secara instingtif akan melindungi dan mengajari anaknya sehingga menjadi dewasa.

Mengapa kebijakan pendidikan itu perlu? Kebijakan pendidikan berkenaan dengan pengaturan kehidupan dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia. Salah satu makna dari proses pendidikan ialah melihat pendidikan sebagai salah satu proses pemberdayaan. Banyak pemikir modern dari berbagai disiplin mengakui makna pendidikan sebagai pembebasan manusia dari berbagai keterikatannya, baik keterikatan biologis, keterikatan sosial dan keterikatan lingkungannya. Menurut Tilaar dan Riant Nugroho (2012:19).

Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Neil (dalam Tilaar dan Riant Nugroho 2012:267) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Margaret E. Goertz (dalam Tilar dan Riant Nugroho 2012:268) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efesiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan kritisisme public terhadap biaya pendidikan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan public, yaitu kebijakan public di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan public. Kebijakan pendidikan merupakan tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagaian dari tujuan pembangunan negara bangsa secara keseluruhan.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan kadang menghambat didalam sebuah kebijakan itu berjalan dengan seharusnya, sehingga pembuat kebijakan dapat meminimalisir faktor-faktor tersebut dan memaksimalkan faktor pendukung dari sebuah implementasi kebijakan.

Ada 3 faktor yang menjadi faktor keberhasilan dan penghambat menurut Arif Rohman (2012:115) yaitu :

1. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan.

Faktor ini berhubungan dengan rumusan kebijakan yang telah diambil oleh pembuat kebijakan. Jelas atau tidaknya sebuah kalimat yang dirumuskan, mudah dimengerti atau tidak, tujuannya tepat sasaran atau tidak, dan dianggap sulit dilaksanakan atau tidak. Dalam perumusan kebijakan perlu dicapainya kesepakatan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan dan informasi agar tercapainya tujuan.

2. Personil Pelaksanaannya

Personil berkaitan dengan pengalaman, tingkat pendidikan, kesetiaan, motivasi, komitmen, kepercayaan diri dan kinerja serta kebiasaan dan mampu berkerjasama dengan para pelaksana kebijakan lainnya.

3. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana ini berkaitan dengan hirarki kewenangan masing-masing, jaringan sistem, gaya kepemimpinan dan pimpinan organisasi, target masing-masing yang diharapkan, serta cara evaluasi yang di pilih

Tujuan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah untuk menetapkan sehingga arah kebijakan pada perumusan kebijakan bisa direalisasikan sebagai hasil kebijakan. Demi mencapai hasil Jan Merse (dalam M. Hasbullah 2015:96) menjelaskan beberapa faktor yang menjadi proses penghambat dari Implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Informasi

Informasi adalah untuk menyatukan pemahaman, visi misi dari kebijakan yang dirumuskan. Untuk menghindari kesalahan pahaman maka di butuhkan informasi secara terus menerus, sehingga menghindari gambaran yang kurang tepat kepada objek kebijakan atau pelaksana kebijakan.

2. Isi Kebijakan

Isi kebijakan harus tegas dan jelas dan memuat seluruh kepentingan pengguna kebijakan. Biasanya kegagalan implementasi bisa di karenakan isi kebijakan yang tidak jelas (samar) dan kurang tepat.

3. Dukungan

Dukunga dapat berbentuk fisik dan non fisik. Jika dalam sebuah kebijakan tidak mendapatkan sebuah dukungan, maka kebijakan tersebut akan susah untuk dijalankan sehingga dukungan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi ini berhubungan dengan koordinasi masyarakat luas. Koordinasi menjadi suatu hal penting dalam titik tertentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

7. Konsep Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.

PIP Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. KIP Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana PIP.

PIP di tujukan untuk membantu anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap agar mendapatkan pendidikan hingga tamat jenjang sekolah menengah, baik jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (paket A hingga paket C serta kursus terstandar). Dengan program ini pemerintah berusaha mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan bisa menarik siswa putus sekolah sehingga kembali melanjutkan pendidikannya.

PIP juga ditunjukan agar bisa meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Prinsip dalam menjalankan program PIP yaitu:

1. Efisien

Di upayakan menggunakan dana yang ada untuk mencapai sasaran ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggung jawabkan

2. Efektif

Diharuskan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

3. Transparan

Menjamin adanya keterbukaan yang memudahkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.

4. Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Kepatutan

Penjabaran program atau kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.

6. Manfaat

Pelaksanaan program atau kegiatan harus sejalan dengan prioritas nasional.

Dalam pelaksanaan PIP terdapat sebuah kartu, yaitu Kartu Indonesia Pintar untuk selanjutnya disebut KIP. KIP digunakan untuk menandakan siswa penerima PIP dan digunakan untuk menjamin serta memastikan bahwa anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat dari PIP bila terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (Kerja paket A/B/C) atau lembaga pelatihan maupun kursus. KIP yang dibagikan di masyarakat berdasarkan hasil sensus penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). KIP mendorong pengikutsertaan anak usia sekolah yang putus sekolah satuan pendidikan untuk kembali bersekolah dan menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

PIP dilaksanakan dengan mengikutsertakan sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya pengarahannya di Direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya. Penentuan penerima dana manfaat PIP dibuat secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Siswa target PIP ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan.
2. Untuk peserta didik paket A/B/C pengesahan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat pembinaan SD/SMP/SMA berdasarkan SK

ditetapkan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, kemdikbud.

- 3 Untuk peserta didik kursus/pelatihan penentuan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan SK penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, kemdikbud.

Dalam penyaluran dana PIP, pencairan dana PIP dilakukan oleh didik/penerima kuasa dari peserta didik di bank/lembaga penyalur dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu:

1. Rekening tabungan.

Peserta didik harus mengaktifitaskan rekening tabungan terlebih dahulu sebelum pencairan/pengambilan dana dengan membawa:

1. Surat ketentuan (SK) kepala sekolah/ketua lembaga
2. Identitas pengenalan (KIP/ Kartu Pelajar/ KTP/KK)

Peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP dapat didampingi langsung oleh kepala sekolah/guru/orang tua/ wali sehingga setelah aktivitas dana PIP dapat langsung dicairkan oleh peserta didik yang menerima. Kemudian pengambilan dana PIP dapat dilakukan dengan cara:

1. Langsung diambil oleh peserta didik dengan membawa syarat dokumen pendukung seperti KIP, kartu pelajar, KTP, KK atau surat keterangan Kepala Desa/ Lurah.

2. Dapat juga dilakukan pengambilan secara kolektif oleh kepala sekolah/kepala lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung yaitu:

1. Surat kuasa dari orang tua/wali atau peserta didik yang menerima PIP
2. Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM)
3. Surat keterangan dari kepala sekolah/ ketua lembaga
4. Fotokopi KTP kepala sekolah/ketua lembaga dan melampirkan aslinya
5. Fotokopi SK pengangkatan Kepala sekolah/ketua lembaga yang masih berlaku dan menunjukan yang aslinya
6. Dan buku tabungan peserta didik penerima PIP yang diambil secara kolektif.

2. Virtual Account

Dengan membawa surat keterangan kepala sekolah/Ketua lembaga dan didampingi oleh kepala sekolah/guru/orang tua/ wali maka bisa dilakukan pengambilan langsung oleh peserta didik. Kemudian pengambilan secara kolektif dapat dilakukan bila memenuhi salah satu syarat atau kondisi sebagai berikut:

1. Kondisi yang sulit untuk penerima PIP mengakses ke bank/lembaga penyaluran, seperti:

- d. Kantor Bank/lembaga penyalur tidak ada kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik.
- e. Kondisi geografis menyulitkan seperti daerah pedalaman, kepulauan, dan pegunungan
- f. Waktu tempuh dan jarak yang relative jauh

2. Kondisi tempat tinggal yang di daerah transportasi sulit, seperti

- a. biaya transportasi yang rekativ besar
- b. terbatasnya armada transportasi

3. Tidak memungkinkannya penerima PIP mengambil dana secara langsung seperti:

- e. Sedang praktik kerja lapangan(PKL)
- f. Sedang sakit
- g. Mengalami bencana alam/cuaca buruk
- h. Hambatan tidak terduga lainnya.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama , menggunakan usulan satuan pendidikan. Kedua, melalui pemadanan Basis Data Terpadu dengan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).

A. Usulan Satuan Pendidikan

- a. Satuan pendidikan mengusulkan data calon penerima KIP kepada dinas

pendidikan (SD dan SMP ke dinas pendidikan kabupaten/pelalawan SMA, SMK dan PKLK ke dinas pendidikan provinsi)

- b. Dinas pendidikan melakukan validasi usulan pendidikan berdasarkan status kelayakan peserta didik sesuai dengan prioritas sasaran penerima KIP.
- c. Dinas pendidikan mengirimkan hasil validasi kepada kemendikbud melalui direktorat teknis sebagai rekomendasi.
- d. Direktorat teknis terkait melakukan penyaringan akhir atas kelengkapan data
- e. rekomendasi untuk ditetapkan sebagaimana penerima KIP. kuasa pengguna anggaran menerbitkan SK daftar nama peserta didik penerima KIP.

B. Pemuktakhiran Basis Data Terpadu (BDT)

Kemensos menyerahkan data peserta didik yang tercatat dalam BDT kepada Kemendikbud untuk dipandankan dengan Dapodikdasmen. Hasil pemadanan ini menjadi dasar penerbitan SK daftar penerima KIP oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dalam hal ini adalah Direktur Pembinaan SD, SMP, SMA, SMK dan PKLK.

C. Pembatalan KIP

Pembatalan KIP dapat dilakukan karena:

1. Perubahan data BDT.

- a. Direktorat teknis terkait memilah data hasil pemadanan BDT dengan Dapodik untuk melihat peserta didik yang keluarganya sudah tidak tercatat lagi di dalam BDT

- b. KPA menerbitkan SK pembatalan berdasarkan hasil penilaian data sebagaimana pada huruf a.

2. Usulan pembatalan dari Dinas

- a. Aplikasi ditemukan peserta didik yang telah meninggal dunia, putus sekolah, tidak diketahui keberadaanya, dan menolak menerima KIP, maka kepala sekolah/lembaga melaporkan status siswa tersebut kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten
- b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan validasi atas laporan dari kepala sekolah/lembaga, dan melaporkannya kepada direktorat terkait sebagai rekomendasi untuk membatalkan KIP (rekomendasi ini dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang menyebabkan peserta didik tidak memungkinkan untuk menerima KIP)
- c. KPA menerbitkan SK pembatalan berdasarkan rekomendasi dinas pendidikan
- d. Pejabat pembuatan Komitmen Terkait mengembalikan dana PIP ke kas Negara berdasarkan rekomendasi berdasarkan SK pembatalan.

Negara berdasarkan rekomendasi berdasarkan SK pembatalan.

Terwujudnya pelaksanaan PIP yang transparan dan akuntabel satu satunya ditandai dengan penggunaan dana PIP oleh peserta didik penerima sesuai ketentuan. Lebih jauh, keberhasilan implementasi PIP sesungguhnya tidak lepas dari keaktifan penggunaan KIP oleh anak/peserta didik usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk bersekolah. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dan

berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa dengan memberikan akses layanan pendidikan terutama peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Agar tamat sampai pendidikan menengah, melalui PIP ini juga diharapkan agar anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah dapat bersekolah kembali.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun acuan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Nur Cahya Aisyah dengan judul Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Atas Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini adalah belum terlaksananya dengan baik pelaksanaana program kartu idonesia di sekolah yang di telitik tesebut sehingga dalam data yang diperolehnya yaitu siswa yang kurang mampu namun tidak semua mendapatkan KIP. Oleh sebab itu upaya pihak sekolah agar dapat semua mendapat kan KIP terus dilakukan dengan pengecekan Data di dapodik. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melihat bagaimana implementasi program kartu Indonesia tersebut, sedangkan perbedaanya, penelitian ini menggunakan variable evaluasi sedangkan penelitian ini menggunakan variable implementasi
2. Anang Budi Prasetyo (2018) dengan judul penelitian Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SD Negeri Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penelitian ini adalah jumlah penerima bantuan KIP disekolah tersebut tidak sebanding dengan jumlah siswa yang kurang mampu yang disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama agar dapat menambah pengatuan bagi masyarakat umum terkhus terhadap program ilmu pemerintahan, sedangkan perbedaanya, penelitian ini memilih meneliti di sekolah dasar.

3. Saras Setyawati (2018), dengan judul Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar Bagi siswa SMK di jeruklegi kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa factor pendukung yang mempengaruhi efektifitas program kartu Indonesia pintar, 1.informasi dari pihak dinas secara rutin kesekolah dan secara online, 2. Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indicator penentu dana KIP. Dan adanya factor penghambat yaitu evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya di mekanismenya. Persamaan dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana program kartu Indonesia berjalan. Sedangkan perbedaanya peneliti ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.
4. Totok Suyanto (2017) dengan judul Efektivitas Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar Siswa Di Desa Ngrayum Untuk Pemenuhan Wajib Belajar 9 Tahun.hasil dalam penelitian ini dilihat dari hasil keseluruhan dari hasil tabulasasi Siswa SMP dan SMA dan Sekolah Dasar ketiganya masuk kriteria kurang efektif, dilihat dari hasil responden yang penelitian ini teliti.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1. Kerangka Pikir Program Kartu Indonesia Pintar DI SMP Negeri 4 Kerumutan



Sumber: modifikasi penulis

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai implementasi program Kartu Indonesia Pintar Di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah merupakan penerapan atau pelaksanaan, juga sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.

2. Kebijakan merupakan yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan dan merupakan petunjuk penyusunan program.
3. Implementasi kebijakan implementasi merupakan pelaksanaan keputusan bisa dalam bentuk undang-undang, bisa pula berbentuk perintah-perintah keputusan eksekutif yang penting dan keputusan badan peradilan
4. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP)
5. Program Indonesia Pintar untuk selanjutnya disebut PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya
6. Kartu Indonesia Pintar untuk selanjutnya disebut KIP. KIP digunakan untuk menandakan siswa penerima PIP dan digunakan untuk menjamin serta memastikan bahwa anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat dari PIP bila terdaftar di sekolah, madrasah, pondok, pesantren, kelompok belajar (Kerja Paket A/B/C) atau lembaga pelatihan maupun kursus.
7. Implementasi program PIP adalah bentuk nyata dari pelaksanaan program PIP dilapangan dengan melibatkan berbagai unsur pelaku kebijakan termasuk masyarakat..

8. Standar sasaran kebijakan adalah untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas ketercapainya standard an sasaran tersebut.
9. Sumber daya adalah kerberhasilan implementasi kebijakan yang sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
10. Karakteristik organisasi pelaksana adalah hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.
11. Komunikasi antar organisasi adalah yang bertanggung jawab atas pencapaian standard an tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana.
12. Disposisi atau sikap para pelaksana adalah sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public.
13. Lingkungan social ekonomi dan politik adalah untuk menilai kinerja implementasi kebijakan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public. Lingkung sosial, ekonomi

dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1. Konsep Operasional

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut van metter van horn dalam Agustino (2006:13)	Implementasi kebijakan	1. Standard dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik organisasi pelaksana 4. Komunikasi antar organisasi 5. Disposisi Sikap para pelaksana 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik	a. Adanya aturan yang jelas b. Adanya sasaran program a. Tersedianya SDM b. Tersedianya anggota c. Tersedianya fasilitas a. Adanya SOP b. jelasnya tanggung jawab a. Adanya kerjasama b. Adanya koordinasi a. Pemahaman pelaksana program b. Respon yang jelas a. Komitmen pelaksana program b. Respon kecamatan sasaran

Sumber: Olahan Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian penulis harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang di hadapi serta metode-metode yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut adalah:

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif , yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kyalitatif, metode ini berusaha menggambarkan mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Alasan peneliti karena SMP Negeri 4 Kecamatan Kerumutan merupakan salah satu sekolah yang menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan

menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dan karena ingin mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat implementasi KIP.

C. Informan Penelitian

a. Key Informan

Key informasi dalam penelitian ini adalah operator sekolah di SMP Negeri 4 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Siak yang mendata dan mengelola KIP, karena penelitian menganggap bahwa operator sekolah SMP Negeri 4 memahami masalah terkait program KIP.

b. Informan

Informasi adalah orang yang dapat memberikan informasi walau tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Bagong Suyanto:172). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini informasi adalah orang-orang atau pelaku yang mengetahui masalah dan informasi. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu:

1. Wakil Kepala Kesiswaan di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan, karena wakil kepala kesiswaan membantu operator sekolah dalam menjalankan program KIP.
2. Bendahara Sekolah di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Karena bahwa bendahara sekolah memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan KIP.

3. Siswa penerima KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan
4. Siswa kurang mampu yang tidak menerima KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupate Pelalawan.
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

D. Teknik Penetapan Informan

Teknik penetapan informasi adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel) informan ini dibutuhkan untuk mengetahui serta memahami masalah mengenai pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar di SMP 4 Kerumutan Kabupate Pelalawan.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagikan kedalam dua bagian yaitu:

1. Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari lapangan atau responden melalui wawancara yang sudah di persiapkan terlebih dahulu.
2. Data Sekunder adalah data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang di peroleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitanya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab dengan cara melakukan komunikasi langsung antara peneliti dengan sumber informasi mengenai bahan atau keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diteliti.

2. Observasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Penulis memilih teknik ini karena ingin melihat fakta yang terjadi di lapangan sehingga informasi yang didapatkan penulis sesuai dengan yang dibutuhkan. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan program kartu Indonesia pintar di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi, bisa berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan untuk membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Gorys Keraf (1994:163) Analisis adalah merupakan suatu proses memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berhubungan. Misalnya dalam suatu observasi, seorang penulis melihat dengan seksama bagaimana berlangsungnya suatu masalah. Dari segi observasi, ia harus sanggup melihat

semua keadaan itu dengan cermat, dan sanggup pula menggambarkan seluruh keadaan sebagaimana dilihatnya waktu itu. Semakin cermat ia membuat analisa kejadian itu, atau semakin cermat ia menunjukan sebab-sebab dan akibat-akibatnya, semakin baik pula jalan keluar yang diberikannya.

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu dengan cara melakukan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap dan menuntaskan masalah-masalah agar dapat dipahami dan dimengerti secara keseluruhan dari penelitian tersebut dengan jelas.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2.: Tabel jadwal waktu penelitian tentang program kartu Indonesia pintar

Di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Agustus				septemb er				Oktober				Novemb er				Desemb er			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP			X	X	X	X														
2	Seminar UP								X												
3	Revisi UP								X	X											
4	Penelitian Lapangan										X	X	X								
5	Pengelolaan dan analisa data													X	X	X	X				

6	Bimbingan Skripsi																	X	X	X			
7	Ujian Skripsi																					X	
8	Revisi Skripsi																					X	X
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																						X

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Sekolah Menengah Pertama 4 Kerumutan Kabupaten

Pelalawan

SMP Negeri 4 Kerumutan Merupakan salah satu SMP yang berada di Kerumutan, di kerumutan Terdiri dari 4 SMP Negeri, yaitu SMP 1 Kerumutan, SMP 2 Kerumutan, SMP 3 Kerumutan dan SMP Negeri 4 Kerumutan. SMP Negeri 4 kerumutan berdiri pada T.P 2011/2012 . yang sebelumnya bernama SMP satu atap makteduh, berdasarkan keputusan Bupati Pelalawan Nomo 800 Tahun 2015 tentang penegerian SMP SATU ATAP MAK TEDUH menjadi sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 4 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Adapun jumlah bangunan/ruang pada awal berdiri waktu itu terdiri dari 3 ruangan , 1 (satu) Ruang kantor kepala sekolah dan Majelis Guru, dan 2 (Dua) Ruang Kelas. Pada awal juli 2012 SMP Negeri 4 Kerumutan di pimpin oleh Asrial Husin S.Pd sebagai kepala sekolah yang tetap/defenitif sampai dengan bulan februari 2018 dan akhirnya pada bulan maret 2018 sampai bulan januari 2019 di pimpin oleh burhannudin S.Pd, dan akhirnya pada maret 2019 sampai dengan sekarang di pimpin kembali oleh Asrial Husin S.Pd .

Lokasi SMP Negeri 4 Kerumutan berdekatan dengan SD Negeri 006 Kerumutan. Siswa-siswi dan masyarakat disekitar SMP Negeri Kerumutan bersifat heterogen. Jumlah masing-masingnya hampir seimbang. Hubungan Sosial

budaya masing-masing suku dan agama ini kondusif, hal ini tampak pada pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat yang diadakan di sekolah dan masyarakat.

B. Visi Misi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan

Visi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan adalah:

“terwujudnya siswa yang mampu bersaing, berbudi pekerti luhur, Berbudaya Melayu, serta dapat menguasai IMTAQ”

Kemudian misi dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan adalah:

Upaya untuk terwujudnya siswa yang mampu bersaing, berbudi pekerti luhur, berbudaya melayu, serta dapat menguasai IMTAQ, maka SMP Negeri 4 Kerumutan Menetapkan Beberapa misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif, efisien, serta memberi bimbingan yang maksimal kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Menanamkan penghayatan ajaran agama yang dianut dan budi pekerti sehingga warga sekolah mampu menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Menumbuhkan inovasi-inovasi dalam proses pendidikan kepada seluruh warga sehingga mampu menggali konsep-konsep peningkatan mutu.
4. Menggali keunggulan serta penelusuran bakat dan minat peserta didik di bidang akademik maupun non akademik.
5. Menciptakan suasana lingkungan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan.

C. Tujuan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan. Adapun tujuan umum pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Mengacu pada tujuan umum tersebut, dapat dijabarkan tujuan pendidikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
2. Meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
3. Membekali peserta didik dengan pengetahuan yang memadai agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
4. Mengembangkan keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi bagi pengembangan daerah.
5. Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terdapat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan terdapat Guru PNS, Guru bantu Honor Daerah (pemda), Guru Honor Komite, Tatat Usaha, Pustakawan Dan Penjaga Sekolah untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1 : Sumber Daya Manusia Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

No	Ijazah tertinggi	jumlah						
		PNS	GBHD	GHK	TU	Pustakawan	Penjaga Sekolah	Jumlah Keseluruhan
1	S 1	4	10	1		1		16
2	D3/D2/D1				1			1
3	SMA/SLTA						1	1
4	SMP							
Jumlah		4	10	1	1	1	1	18

Sumber : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan

E. Kondisi Siswa

Jumlah keseluruhan peserta didik tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 109 orang, kelas VII sebanyak 38 orang, kelas VIII sebanyak 42 orang, kelas IX sebanyak 29 orang untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2 : Kondisi siswa di Sekolah Menengah Peratama Negeri 4

Kerumutan tahun 2019/2020

Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
VII	19	19	38
VIII	27	15	42
IX	19	10	29
Jumlah	65	44	109

Sumber : Operator SMP 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Key Informan dan Informan

Deskripsi identitas key informan dan informan merupakan identitas yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian tentang “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan”. Yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah operator sekolah dan yang menjadi infoman adalah wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, siswa penerima KIP dan siswa Kurang Mampu yang tidak menerima KIP, Kepala UPTD Kerumutan. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.I : Identitas Key Informan dan Informan

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Tingkat pendidikan	Jabatan
1.	Sami'an, A.Md	Laki-laki	34	D3	Operator sekolah SMP Negeri 4 Kerumutan
2.	Saipul Bahroni S.Pd.I	Laki-laki	37	S1	Wakil Kepala Kesiswaan SMP Negeri 4 Kerumutan
3.	SiviArafah Astrianingsih S.Pd	Perempuan	29	S1	Bendahara Sekolah SMP Negeri 4 Kerumutan
4.	Reni	Perempuan	14	SMP	Siswi Penerima KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan
5.	Kharisma Khapoor	Perempuan	13	SMP	Siswi Penerima KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan
6.	Tiara	Perempuan	14	SMP	Siswi Kurang Mampu yang tidak

					mendapatkan KIP
7.	Mardiana Dwi Novita Sari	Perempuan	13	SMP	Siswi Kurang Mampu yang tidak mendapatkan KIP
8.	Ali Amran	Laki-Laki	54	S1	Kepala UPTD Kerumutan

Sumber: Olahan Penelitian Dari Hasil Wawancara Lapangan 2020

Dari tabel diatas yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah bapak samian. A.Md Selaku Operator Sekolah Di SMP Negeri 4 Kerumutan. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Saipul Bahroni Selaku Wakil Kepala Kesiswaan SMP Negeri 4 Kerumutan, Ibu Silvi Arafah Astiningsih Selaku Bendahara Sekolah Di SMP Negeri 4 Kerumutan, serta 2 orang siswi Penerima KIP Di SMP Negeri 4 Kerumutan yaitu Reni dan Kharisma Khapoor, serta 2 orang siswi Kurang Mampu yang tidak menerima KIP yaitu Tiara dan Mardiana Dwi Novita Sari. Dan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Dengan beberapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan diatas, Operator Sekolah SMP Negeri 4 Kerumutan sebagai key informan dianggap mampu oleh peneliti dalam memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan oleh penelitian sesuai indikator yang digunakan. Kemudian wakil kepala kesiswaan juga merupakan hal penting dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini karena dalam pelaksanaan program KIP merupakan tugas dan fungsi dari beliau untuk membantu operator sekolah dalam pelaksanaan program KIP tersebut Di Sekolah. Bendahara SMP Negeri 4 Kerumutan dan UPTD Kerumutan juga berperan penting karena dalam program pelaksanaan KIP

di sekolah termasuk tugas dan fungsi mereka. Juga siswa/siswi yang kurang mampu, yang mendapatkan KIP dan yang tidak mendapatkan KIP agar dapat memberikan informasi terkait program kartu Indonesia pintar di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan hasil penelitian tentang Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini mengfokuskan pada Program Kartu Indonesia Pintar Di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang program Indonesia pintar yang ditandai dengan KIP yang mana dalam program tersebut belum berjalan seperti yang diamanatkan didalam peraturan mendikbud tersebut.

Yang menjadi permasalahan dalam program KIP Di SMP Negeri 4 Kerumutan dari daftar data siswa yang kurang mampu ditemukanya ada siswa kurang mampu yang belum sepenuhnya mendapatkan KIP. Dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan para informan, maka penulis akan menguraikan hasil wawancara tersebut dalam bentuk uraian mengenai pelaksanaan program kartu indonesia pintar di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Maka untuk mengetahuinya dapat dikemukakan melalui indikator sebagai berikut:

1. Standard dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksanaan
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksanaan
6. Lingkungan social, ekonomi dan politik

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada 1 key informan dan 7 informan diantaranya yaitu Bapak Samian , A.Md selaku Operator Sekolah Di SMP Negeri 4 Kerumutan, Bapak Saipul Bahroni S.Pd.I selaku Wakil Kepala Kesiswaan SMP Negeri 4 Kerumutan, Ibu Silvi Arafah Astrianingsih S.Pd selaku Bendahara SMP Negeri 4 Kerumutan, Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD Kecamatan Kerumutan, reni dan Kharisma Khapoor selaku siswi penerima KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan, Tiara dan Mardina Dwi Novita sari selaku siswa yang belum menerima KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut van metter dan Horn, Standar dan Sasaran Kebijakan ialah untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Standar dan Sasaran Kebijakan pencapaian tugas secara tepat yang dilakukan oleh para pelaksana sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Salah satu yang harus dilihat dari keberhasilan tugas yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 4 Kerumutan dalam standar dan Sasaran Kebijakannya. Dimana Penulis memiliki beberapa item penelitian dalam melihat tingkat keberhasilan atau tugas yang diberikan kepada SMP Negeri 4 Kerumutan Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator standar dan Sasaran Kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Aturan dari Program Indonesia Pintar yang di Tandai dengan Kartu Indonesia Pintar.

Dengan adanya aturan Program Indonesia yang di Tandai dengan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang dan siswa dapat terpenuhi kekurangan pada alat sekolah. Melalui Kartu Indonesia Pintar diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut. Untuk melihat adanya aturan dari Program Indonesia Pintar yang di Tandai dengan Kartu Indonesia Pintar maka penulis uraikan hasil wawancara dengan informan dan key informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak sami'an A.Md selaku Operator Sekolah Di SMP Negeri 4 Kerumutan menjelaskan bahwa:

“ PIP adalah program Indonesia Pintar dan KIP kartu indonesia pintar Kalau melihat tujuan program ini sudah bagus, karena selama ini KIP cukup membantu keperluan siswa yang kurang mampu untuk membeli perlengkapan sekolah”.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni S.Pd selaku wakil kepala kesiswaan Di SMP Negeri 4 Kerumutan yang mengatakan bahwa:

“ Dengan adanya KIP ini ya tentu sangat membantukan apalagi untuk siswa yang kurang mampu, dan menurut bapak sendiri aturan ini atau program ini bagus ya dan sangat membantu siswa yang kurang mampu”.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan ibu silvi arafah Astrianingsih S.Pd selaku bendahara sekolah Di SMP Negeri 4 Kerumutan yang mengatakan bahwa:

“ PIP ini kan program yang dibuat pada masa pak jokowi kan, untuk siswa yang kurang mampu, ibuk juga belum terlalu paham ya jadi yang lebih paham mungkin aturan nya dan siapa saja siswa yg mendapat kan KIP mungkin lebih jelasnya Tu ya, yang jelas menurut ibu aturan PIP ini bagus karnakan diperuntukkan untuk siswa yang kurang mampu ya, jadi seperti itu”.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan reni siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan yang mengatakan bahwa (pada 29 Desember 2020)

“ sepengetahuan saya untuk siswa yang kurang mampu, untuk membeli perlengkapan sekolah juga dengan menggunakan uang dari KIP”.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan yang mengatakan bahwa:

“ Tidak tau kak, soalnya waktu di sd saya tidak mendapatkan nya, setelah di SMP ni baru saya dapat”

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari Siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“tidak tau saya kak”

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara Siwa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan.

“ saya tidak tau kak”

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran S.Pd selaku Kepala UPTD Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang mengatakan bahwa:

“untuk aturan dengan diadanya PIP ini baik ya, ini kan PIP biasanya masyarakat kurang mampu bisa mengurus di desa ,yang di peruntukan untuk memabantu yang kurang mampu.”

Hasil Observasi Dari tanggapan di atas dapat dilihat bahwa belum sepenuhnya kegiatan program PIP yang ditandai dengan KIP ini merupakan program yang sangat membantu dilihat dari aturan yang di peruntukan untuk siswa yang kurang mampu, namun didalam sosialisai yang dilakukan pihak sekolah kepada siswa masih belum terlaksanakan dengan baik sehingga siswa masih bingung apa itu PIP dan KIP ini tujuanya secara keseluruhan.

2. Sasaran Dalam Program KIP

Sasaran dalam Program Kartu Indonesia Pintar ini siswa dari keluarga miskin/rentan miskin, siswa yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuha, Peserta didik yang terkena bencana. Untuk melihat bagaimana sasaran dalam Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan apakah sudah berjalan lancar maka dari itu penulis telah melakukan wawancara dengan informan dan key informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak sami'an A.Md selaku Operator Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan menjelaskan bahwa:

“ Sasaran yang menerima KIP yaitu yang sudah mempunyai KIP dan PIP, dan nantik untuk siswa yang kurang mampu yang belum mendapatkan KIP pihak sekolah akan mengusulkan dan menginput data siswa tersebut, selanjutnya ikut peraturan pemerintah pusat”.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni S.Pdi selaku wakil Kepala Kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan sebagai berikut:

“ untuk sasaran KIP sejauh ini sudah berjalan baik Cuma terkadang terdapat beberapa kendala seperti barang kali anak tidak mampu yang tidak mendapatkan KIP”(10 Desember 2020 jam 10.21)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan ibu Silvi Arafah Astriningsih selaku bendahara sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ untuk sasaran KIP ini adalah siswa yang dikategorikan tidak mampu biasanya kita ambil dasarnya ada surat keterangan tidak mampu dari desa dan juga anak yatim piaytu” (10 Desember 2020 10.45)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“saya lihat kak masih ada teman-teman yang kurang mampu sepeti saya tapi belum dapat KIP” (29 Desember 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“sasaran saya tidak tau kak, tapi uang nya saya belikan untuk peralatan sekolah dan tas” (29 Desember 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari siswa yang tidak Menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“saya tidak tau juga kak”(29 Desember 2020 17:58)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Mengatakan:

“ sasaran nya tidak tau kak, punya saya (KIP) mungkin lagi di urus sama sekolah kak”(29 Desember 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“ untuk sasaran sejauh ini berjalan baik ya dan tidak ada juga keluhan dari sekolah ke saya” (23 Desember jam 09:53)

Hasil Observasi dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa terlihat jika sebagian dari siswa mengetahui sasaran yang layak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan kurang maksimal dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh siswa sehingga siswa lebih cenderung untuk menunggu namanya otomatis keluar.

2. Sumber Daya

Menurut Van Metter and Van Horn sumber daya yaitu setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya merupakan terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Adapun unsur pertanyaan pada indikator sumber daya ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM didalam Program Kartu Indonesia Pintar

Program Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM nya. Tersedianya SDM didalam program Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu hal yang penting agar suatu program dapat terlaksanakan. Untuk mengetahui bagaimana tersedianya SDM didalam Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan maka penulis telah melakukan wawancara dengan informan dan key infroman sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak sami'an A.Md selaku Operator Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan menjelaskan Bahwa:

“ sumber daya manusia di SMP ini cukup baik”(17 Desember 2020 11.13)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni S.Pdi selaku wakil kepala kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahawa:

“ untuk sumber daya manusia nya berjalan dengan baik, tetapi kurang efektif , dan yang utama menguasai informasi dan teknologi adalah TU” (10 Desember 10.21)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Arafah Astrianingsih selaku Bendahar Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahawa:

“ sumber dayanya cukup memadai hanya saja yg paling banyak mengetahui hal ini (KIP) adalah pak Sami'an TU, jadi informasinya ibu juga kurang tau “ (10 Desember 2020 10.45)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni siswi penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumuta mengatakan bahawa:

“ sayak tidak tau kak kalau sumber daya manusia” (29 Desember 2020 17.20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil waancara dengan Kharisma Khapoor siswi penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahawa:

“ gak tau juga kak” (29 Desember 2020 17.20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari siswi yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ maaf kak saya gak tau juga ” (29 Desember 2020 17.58)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara siswi yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ Sumber daya manusia saya tidak tau kak ” (29 Desember 2020 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia mencukupi bagus ya, seperti TU disekolah yang membantu menginput data siswa ke orang pusat (pemerintah pusat)” (23 Desember 2020 09.53)

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa SDM nya cukup baik hanya saja masih ada beberapa SDM yang terlibat di dalam pelaksanaan program kartu Indonesia pintar tersebut yang tidak mengetahui secara jelas informasi KIP tersebut.

2. Tersedianya anggota didalam Kartu Indonesia Pintar

Tersedianya anggota didalam Program Kartu Indonesia Pintar merupakan orang-orang yang sekiranya terlebit didalam pelaksanaan program Kartu

Indonesia Pintar untuk mengetahui bagaimana tersedianya anggota didalam Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan apakah sudah berjalan dengan baik maka penulis uraikan hasil wawancara dengan infroman dan key infroman sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak sami'an A.Md selaku Operator Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan Bahwah :

“ kalau untuk anggota selama ini hanya kami dari pihak sekolah saja yg mengusulkan siswa kurang mampu, kalau dari desa atau kelurahan yang memberi infromasi ke kita pihak sekolah sejauh ini belum ada, jadi untuk anggotanya iya kami yg terlibat di dalam KIP ini saja, dan saya (selaku operator sekolah) ”.(17 Desember 2020 11.13)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni S.Pdi selaku wakil kepala kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Mengatakan Bahwa:

“kalau selama ini anggotanya ya tenaga pendidikan di sekolah ini (SMP Negeri 4 Kerumutan) kalau ditanya anggotanya iya seperti ketuanya kepala sekolah kemudian tenaga pendidikan yg terlibat TU dan juga siswa yg kurang mampu” (10 Desember 2020 10.21)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Arafah Astrianingsih selaku bendahara sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ ini maksud dari tersedianya anggota ini siswa penerima KIP? kalau siswa kurang mampu penerima KIP tersedia untuk di sekolah ini, tapi kalau anggota pelaksanaan KIP disekolah ni itu ada TU, Tenaga pendidik dan ketuanya ada kepala sekolah” (SMP Negeri 4 Kerumutan). (10 Desember 2020 10.45)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni siswa Penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“untuk anggota penerima KIP itu ada, tapi saya tidak tau lupa siapa siapa saja orang nya yg jelas bukan saya sendiri kak”. (29 Desember 2020 17.20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“saya tidak tau kak anggotanya ini apa”(29 Desember 2020 17.20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ tersedia kak ,ada juga teman saya yg lain yg belum menerima KIP” (29 Desember 2020 17.58)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Mengatakan bahwa:

“anggotanya tersedia kak, ada saya dan teman yang lain juga saya rasa yang belum menrima KIP”(29 Desember 2020 17.20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“ untuk anggota pelaksanaan KIP ini disekolah itu biasaya tersedia dan orang nya itu adalah tenaga pendidik, TU yang di ketuai oleh kepek, dan informasi dari pusat biasanya ada langsung di beritahukan kepada pihak sekolahnya”.(23 Desember 2020 09.53)

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa tersedianya anggota di dalam pelaksanaan Program KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan tersedia, namun kurang efektif dan juga masih terdapatnya siswa yang tidak mengerti anggota yang di maksud di dalam program KIP Tersebut.

3.Tersedianya Fasilitas di dalam Program KIP

Fasilitas merupakan hal yang penting didalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar apalagi untuk menunjang dan membantu menjalankan suatu program tentunya menggunakan dan memerlukan fasilitas, fasilitas di sediakan bisa berupa benda maupun pelayanan. Untuk melihat bagaimana Tersedianya fasilitas didalam Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan apakah sudah tersedia dengan baik,maka penulis telah melakukan wawancara dengan informan key informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sami'an A.Md selaku Operator Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ fasilitas nya tersedia tapi tidak begitu lengkap dan masih terbatas, seperti laptop yang kami gunakan terkadang bergantian pakai dengan tenaga pendidik lainnya dikarenakan jumlahnya yang terbatas, kemudian handphone juga merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk akses menerima pemberitahuan dari orang pusat”. (17 Desember 2020 11.13)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni S.Pdi selaku wakil kepala kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ iya fasilitas nya itu sama dengan aksesnya ya, fasilitas yang kami berikan kepada siswa itu berupa pelayanan, kalau fasilitas berupa barang ada seperti tersedianya computer dan laptop di sekolah ini” (10 Desember 2020 10.21).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Arafah Astrianingsih selaku bendahara sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ menurut saya pribadi untuk failitas yang tersedia di sekolah ini cukup memadai hanya mungkin terkendala di jaringan kadang, soalnya jaringanya kadang bagus jadi nantik terkandala juga kalau ada informasi jadinya terganggu”(10 Desember 2020 10.45)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni siswa Penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ fasilitasnya tersedia kak, seperti laptop computer di sekolah”(29 Desember 2020 17.20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“fasilitasnya berupa memberikan informasi secara langsung kepada saya dan teman yang lain yang mendapatkan KIP, bahwa uang nya sudah bisa di ambil ke bank”(29 Desember 2020 17.20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Mengatakan Bahwa:

“fasilitasnya cukup lengkap kak, saya liat ada computer laptop juga” (29 Desember 2020 17.58)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakn bahwa:

“ saya tidak tau kak,soalnya sudah lama juga tidak kesekolah semenjak pandemic ini”(29 Desember 2020 17.20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“fasilitasnya cukup bagus ya menurut bapak dan masih sama sejauh ini belum ada keluhan, mungkin akses jalan dan jarak yg di tempuh siswa untuk mencair kan uang tersebut cukup jauh ya dengan kondisi jalan yang kurang bagus, tapi pihak sekolah juga bisa membantu anak sekira mengantar kan mereka ke bank bersama wali murid”.(23 Desember 2020 09.53)

Hasil Observasi dari tanggap diatas dapat dilihat bahwa untuk tersedianya fasilitas di SMP Negeri 4 Kerumutan dalam pelaksanaan Program KIP tersebut, yaitu tersedia cukup hanya saja tidak begitu lengkap dan masih terdapat juga kendala seperti sulitnya akses jaringan di sana.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut van metter and van horn karakteristik organisasi pelaksana yaitu pusat perhatian pada agem pelaksana meliputi organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Karakteristik organisasi pelaksana adalah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan atau yang dijalankan. Adapun unsur pertanyaan pada indikator karakteristik organisasi pelaksana sebagai berikut:

1. Adanya SOP dalam program Kartu Indonesia Pintar

SOP adalah Standar Operasional Prosedur, dengan adanya SOP ini diharapkan implementasi Kartu Indonesia Pintar dapat berjalan efektif. Maka dari itu adanya SOP di dalam program Kartu Indonesia Pintar merupakan hal yang penting dalam berjalanya suatu program untuk mengetahui bagaimana adanya SOP di dalam Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan maka penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan dan key informan yang terlibat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sami'an A.Md selaku Operator Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ tidak selamanya berjalan dengan lancar SOP di sekolah ini, terutama dalam memberikan informasi kepada siswa ”(17 Desember 2020 11.13)

Selanjut peneliti uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni S.Pdi selaku wakil kepala kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ SOP yang telah ditetapkan oleh program tersebut (program KIP) sudah berjalan lancar artinya tidak ada permainan apa-apa, umpunya dana itu masuk langsung ke rekening bank dan langsung kepada siswa, jadi sudah jelas dan sesuai” (10 Desember 2020 10:21)

Selanjutnya peneliti uraikan hasil wawancara dengan Ibu Silfi Arafah Astrianingsih selaku Bendaha Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“menurut ibu sendirinya kalau SOP nya berjalan lancar ya dan tidak ada masalah sejauh ini,sejauh program KIP di sekolah ini berjalan”(10 Desember 2020 10:45)

Selanjutnya peneliti uraikan hasil wawancara dengan Reni siswa Penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ tidak tau saya kak, soalnya tidak ada juga di jelaskan SOP nya apa dari sekolah” (29 Desember 2020 17:20)

Selanjutnya peneliti uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor selaku siswa Penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Mengatakan bahwa:

“kurang tau saya, dan tidak mengerti juga, yang jelas selama saya neima KIP di sekolah tidak ada masalah selama ini” (29 Desember 2020 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Mengatakan bahwa:

“ tidak tau juga kak”(29 Desember 2020 17:58)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Petama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ kalau SOP ini saya kurang tau ya kak seperti apa ” (29 Desember 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“ menurut bapak sendiri SOP atau standar operasional nya cukup baik yang terjadi sejauh ini dan tidak ada juga masalah, tapi untuk lebih jelas nya lagi mungkin bisa ditanyakan ke sekolah langsung seperti apa SOP yang terjadi di sana, jadi saya tidak bisa juga menjelaskan secara detail karna orang pihak di sekolah yang lebih tau, terutama TU jadi seperti itu lah kira-kira yang bisa saya sebutkan” (23 Desember 2020 09:53)

Dari Hasil Observasi pernyataan di atas bisa dilihat bahwa untuk adanya SOP di dalam program KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan belum bisa dikatakan berjalan sepenuhnya lancar, karna di dalam SOP tentu ada komunikasi di dalamnya, sehingga dapat dikatakan masih ada kendala dan kurang berjalan dengan baik.

2. Jelasnya Tanggung Jawab dalam Program Kartu Indonesia Pintar

Di dalam suatu program tentu harus ada tanggung jawab, begitupun didalam Program Kartu Indonesia Pintar. didalam program Kartu Indonesia Pintar yang menjadi Tanggung Jawab adalah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kartu Indonesia pintar tersebut, dan kemudian bagi siswa yang memiliki kartu Indonesia pintar itu menjadi tanggung jawab masing-masing penerima. Untuk melihat bagaimana jelasnya tanggung jawab dalam Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan apakah sudah jelas dan berjalan baik, untuk mengetahuinya penulis uraikan hasil wawancara dengan informan dan key informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sami'an A.Md selaku Operator Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ untuk tanggung jawab nya kami dari pihak sekolah tentunya bertanggung jawab sampai dengan dana tersebut sudah masuk ke rekening siswa, dan juga kami dari pihak sekolah juga bertanggung jawab untuk mengusulkan nama-nama siswa yang kurang mampu dan membantu melengkapi kiranya ada persyaratan yang belum lengkap, kami juga akan memberitahukan kepada mereka (siswa) apa- apa saja yang perlu untuk di persiapkan, dan memberitahukan juga kepada siswa yang menerima KIP agar uang yang di terima diperuntukan untuk keperluan dan kebutuhan sekolah” (17 Desember 2020 11:13)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni selaku wakil kepala kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ kalau untuk tanggung jawabnya sudah jelas menurut saya, kami juga selaku tenaga pendidik yang terlibat juga ikut bertanggung jawab untuk kelancaran program KIP ini, agar sesuai dengan maksud dari tujuan program KIP ini”. (10 Desember 2020 10:21)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Arafah Astrianingsih selaku Bendahara Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Mengatakan bahwa:

“ menurut ibu jelasnya tanggung jawab di sekolah ini untuk berlangsungnya program KIP ini cukup jelas, dan tidak ada masalah juga dan berjalan dengan lancar” .(10 Desember 2020 10:45)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni siswa Penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ ini menurut saya ya kak, menurut saya jelas kak” (29 Desember 2020 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor siswa Penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Mengatakan bahwa:

“ tanggung jawab cukup jelas, apalagi selama di sekolah pihak sekolah juga bertanggung jawab memberikan informasi kepada kami (penerima KIP)”.

(29 Desember 2020 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari siswa yang tidak Menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ tanggung jawabnya jelas, membantu saya dan memasukan nama agar mendapatkan KIP” (29 Desember 2020 17:58)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan tiara siswi yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Mengatakan bahwa:

“ kurang tau saya kak” (29 Desember 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil uraikan wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“ untuk berlangsung program ini tentu pihak sekolah bertanggung jawab agar dapat terlaksanakan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan”. (23 Desember 2020 09:53)

Hasil Observasi Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa jelasnya tanggung jawab dalam program KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan dapat

dikatkan cukup jelas dan bertanggung jawab agar program KIP ini dapat berjalan dengan lancar.

4. Komunikasi antar organisasi

Menurut Van metter and van horn mengatakan komunikasi antar organisasi yaitu apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standard an tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Komunikasi antar organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi, terjadi jaringan pesan satu sama lain yang bergantung satu sama lain. Adapun unsur pertanyaan pada indikator komunikasi antar organisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama yang dilakukan didalam program Kartu Indonesia Pintar

Didalam penerapan Program Kartu Indonesia Pintar bekerja sama dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kerjasama di dalam suatu program sangatlah di perlukan agar dapat berjalan sesuai denga aturan dan sistem dari program itu sendiri, untuk melihat bagaimana kerja sama yang dilakukan didalam program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan maka penulis uraikan hasil wawancara dengan informan dan key infroman sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sami'an A.Md selaku Operator Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“kurang efektif karena pihak sekolah tidak menerima informasi dari siswa ataupun wali murid, bahwa siswa tersebut telah mengambil duit nya ke bank” (17 Desember 2020 11:13).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni S.Pdi selaku wakil kepala kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ Orang tua siswa serta pihak sekolah sudah menjalankan program nya masing-masing iya artinya berjalan dengan baik tidak ada kendala” (10 Desember 2020 10:21).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu silvi Arafah Astrianingsih selaku Bendahara sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ menurut saya sendiri untuk sejauh program ini berjalan di sekolah ini kerjasama nya antara orang tua siswa , siswa dan pihak sekolah berjalan baik, tapi yang terkadang orang tua siswa atau siswa nya masih ada terkadang kurang memberi informasi kepada kami pihak sekolah soal uang yg mereka cairkan apakah sudah di ambil atau belum nya, nantik takutnya masih bisa kami ntah ada kendala tidak bisa mengambil uang tersebut ntah itu sulitnya transportasi mungkin bantu”.(10 Desember 2020 10:45)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ Kerjasama antara kami (siswa penerima KIP) dengan pihak sekolah berjalan dengan baik kak” (29 Desember 2020 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor selaku siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ kerjasama yang dilakukan pihak sekolah dengan kami semuanya baik saja kak”.(29 Desember 2020 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari selaku siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ kalau masalah kerjasamanya saya tidak tau kayak mananya kak” (29 Desember 2020 17:58)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ tidak tau saya kak” (29 Desember 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran S.Pd selaku kepala UPTD Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“ untuk kerja sama yang terjalin antara pemerintah, dengan pihak sekolah dan juga siswa serta wali murid tentu harus adanya kerja sama, agar program KIP ini dapat terselenggarakan dengan baik, maka diperlukan lah kerja sama tersebut.” (23 Desember 2020 09:53)

Hasil Observasi dengan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kerjasama yang dilakukan didalam Program KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan, belum dapat dikatakan sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih adanya kendala yang ditemukan didalam kerja sama yang telah dilakukan didalam program KIP ini seperti kurang informasi antara siswa atau pun wali murid kepada pihak sekolah seperti dalam hal mencairkan dana KIP tersebut apakah sudah terlaksanakan dan telah di ambil dengan baik.

2. Adanya Koordinasi dalam Program KIP

Koordinasi yang menangani Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar dalam mengimplementasikan program tersebut dengan pembentukan tim/ kepanitiaan dari Pihak Sekolah dengan melakukan sosialisasi program yang biasanya menerapkan jadwal sosialisasi yang dilaksanakan kepada Siswa. Untuk melihat bagaimana adanya koordinasi dalam Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan penulis telah melakukan wawancara dengan informan dan key informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak sami'an selaku Operator Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ Koordinasi siswa dengan sekolah kurang tepat sasaran karena siswa yang kurang mampu masih ada yang belum mendapatka KIP, dan untuk melengkapi persyaratan pun siswa nya terkadang tidak begitu peduli, atau kurang mengerti, jadi seperti kurangnya Kurangnya Koordinasi disekolah ini”. (17 Desember 2020 11:13).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni selaku wakil kepala kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ kalau koordinasinya sampai sejauh ini bagus, contohnya infromasih pencairan bertahap dari pemerintah itu koordinasinya berjalan dengan baik, yang jelas selama ini kalau koordinasi antara pemerintah pusat dengan pihak sekolah bagus, kemudian koordinasi dari perbank kan ke sekolah bagus, kemudian sekolah kepada pemanfaat atau kepada siswa juga bagus, intinya koordinasinya bagus sampai hari ini” . (10 Desember 2020 10:21).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Arafah Astrianingsih selaku Bendahara Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ Koordinasi yang ada di SMP ini menurut saya aman-aman saja , koordinasi yang dilakukan pihak sekolah antara siswa juga sejauh ini aman dan

terkendali juga nggak ada masalah, iyaa ini nya berjalan lancar saja jadi seperti itulah kira-kira” .(10 Desember 2020 10:45)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni selaku siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ Koordinasinya bagus antara sekolah dengan kami sebagai penerima KIP”

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor selaku penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ kurang tau juga saya kak””.(29 Desember 2020 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ saya tidak bisa jawab juga kak soalnya kurang tau juga kayak mananya” (29 Desember 2020 17:58)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ koordinsinya bagus kak antara kami siswa dengan sekolah, sekolah juga bertanggung jawab untuk mengusulkan nama kami(siswa kurang mampu) untuk mendapatkan KIP”. (29 Desember 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“ untuk koordinasi program KIP ini allhamdulillah berjalan lancar di sekolah sekolah tentunya, hanya saja mungkin koordinasi masyarakat kepada pihak desa kurang, karena kan untuk mengrus KIP dan PIP pihak desa juga harus membantu bagi warga nya yang kurang mampu agar, jadi pihak sekolah juga mudah untuk mengusul kan anak yang kurang mampu tersebut agar dapat menikmati dana KIP ini untuk keperluan dan perlengkapan sekolahnya. Jadi seperti itulah untuk koordinasi bisa dibilang lancar, karna pihak sekolah juga tidak ada yang melapor atau pun memeberitahukan masalah didalam program KIP ini kepada kami (UPTD), dan artinya bisa dikatakan berjalan lancar”. (23 Desember 2020 09:53)

Hasil Observasi pernyataan diatas dapat dilihat koordinasi yang terdapat didalam Program KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan masih belum terlaksanakan dengan baik sepenuhnya,masih ada beberapa masalah yang terjadi di lapangan didalam pelaksanaan program KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan tersebut seperti kurang nya sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah kepada siswa.

5. Disposisi Sikap para Pelaksana

Menurut van metter and van horn Disposisi Sikap para Pelaksana yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.

Disposisi sikap para pelaksana adalah diartikan sebagai dukungan anggota tim koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukan dengan komitmen terhadap terlaksananya program. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan informan, berikut ini indikator Disposisi sikap para pelaksana meliputi:

1. Pemahaman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar

Dalam suatu program tentu sebagai yang menjalankan program harus memahami pelaksanaan didalam Program tersebut, seperti halnya Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar tersebut, pihak yang menjalankan harus mengetahuin dan memahami tujuan dan aturan program tersebut, agar berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Pelaksanaan Progran Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan apakah sudah berjalan dengan baik maka penulis uraikan hasil wawancara dengan informan dan key informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sami.an selaku Operator Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ kebijakan pemerintah mengadakan program KIP ini diharapkan dapat membantu anak putus sekolah.untuk pemahan pelaksanaan program KIP ini saya rasa cukup jelas yaitu untuk siswa yang kurang mampu, kami pihak sekolah juga telah berupaya mengusulkan data siswa yang kurang mampu ke pusat” (17 Desember 2020 11:13).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni selaku wakil kepala kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ pemahaman dalam pelaksanaan program KIP ini dari kami pihak sekolah dapat dikatakan paham tentang tujuan serta sasaran program ini adalah siswa yang kurang mampu, anak yatim,masyarakat miskin, kita pihak sekolah juga harus memahami itu, tetapi yang jadi permasalahan sekarang itu adalah, siswa yang menerima KIP tersebut belum sepenuh nya paham maksud program ini maksudnya itu ada siswa yang menggunakan dana KIP tersebut untuk membeli barang diluar dari kebutuhan dan perlengkapan sekolah, padahal dana tersebut digunakan untuk memebeli dan melengkapi keperluan sekolah mereka,jadi artinya pemahamannya dalam program KIP ini kurang kan”. (10 Desember 2020 10:21).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Arafah Astrianingsih selaku Bendahara Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ pemahaman pelaksanaan program KIP di sekolah ini masih kurang terutama siswanya juga banyak yang belum paham maksud dari program ini juga, soalnya ada siswa yang kami tahu dia malah menggunakan uang nya untuk di belanja kan ke kebutuhan yang lain, bukan untuk keperluan sekolah padahal program KIP ini salah fungsinya untuk membantu mereka yang ekonominya kurang mampu sehingga memungkinkan kan mereka untuk sulit sekolah dan membeli kebutuhan sekolah, jadi pelaksanaan program ini sasaran nya untuk itu salah satu nya. Tapi ternyata menurut saya pehaman pelaksanaan program KIP di sekolah ini belum efektif” .(10 Desember 2020 10:45).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni selaku siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ pemahaman pelaksanaan KIP saya kurang tau kak, yang saya tau tujuan nya itu adalah untuk membantu siswa yang kurang mampu” (29 Desember 2020 17:20).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor selaku siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ saya menerima KIP dari sd kelas 5 tapi saya tidak tahu kemana uangnya dan tidak pernah menerimanya, kemudian setelah masuk SMP nama saya langsung terdaftar dan saya dapat menerima uang KIP ini, jadi saya kurang tau juga dan gak paham seperti apa pelaksanaan program nya dan gak ada nanya juga sama guru”.(29 Desember 2020 17:20).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ saya tidak tau juga kak”. (29 Desember 2020 17:58)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ gak tau kak, tidak ada juga yang ngasih tau pelaksanaan nya seperti apa kepada saya, jadi saya juga tidak tau”. (29 Desember 17:20).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“ Pemahaman dan pelaksanaan program KIP ini saya rasa pihak sekolah sudah paham mekanismenya secara menyeluruh, dan pelaksanaan program KIP ini juga jelas adalah dari pemerintah pusat kepada sekolah, maka sekolah harus

siap melaksanakan program KIP ini sebaik mungkin agar berjalan dengan baik”.

(23 Desember 2020 09:53)

Hasil Observasi pernyataann di atas dapat dilihat bahwa Pemahaman dan Pelaksanaan program KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan belum dapat dikatakan baik sepenuhnya, masih terdapat siswa yang kurang mengerti dan paham tentang pelaksanaan dan program KIP ini serta kurangnya sosialisasi pihak sekolah ke pada siswa dalam hal ini.

2. Respon yang Jelas di dalam Program Kartu Indonesia Pintar

Respon adalah tanggapan, persepsi dan partisipasi. Di dalam suatu program perlu adanya respon yang jelas terkait dengan pelaksanaan program itu sendiri serta dapat pertukaran informasi terkait dengan persepsi masing-masing di dalam program Kartu Indonesia Pintar untuk itu bagaimana respon yang jelas di dalam Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan apakah sudah jelas maka penulis uraikan hasil wawancara dengan beberapa informan dan key informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sami'an A.Md selaku Operator Sekolah di Sekolah Menengah Pertama mengatakan bahwa:

“Menurut saya respon baik dari sekolah, siswa atau pun wali murid itu baik dan mereka juga merasa sangat terbantu dengan adanya KIP ini”. (17 Desember 2020 11:13).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni S.Pdi selaku wakil kepala kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya sendiri sejauh ini allhamdulillah ya respon nya baik tidak ada masalah dari pihak mana pun, karna memang program ini bagus dan sangat membantu mereka yang kurang mampu, jadi tidak ada yang di tutupi dan saling terbuka saja antara kami pihak sekolah dengan siswa si penerima KIP ini”. (10 Desember 2020 10:21).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Arafah S.Pd selaku Bendahara sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ responya baik lah tentunya karna kan program bapak jokowi ini menurut ibu sendiri sangat bagus, jadi sangat ngebanu dan bermanfaat untuk siswa yang ekoninya rendah, jadinya kan respon mereka pun juga bagus karena sudah sangat membantulah keperluan mereka di sekolah”. (10 Desember 2020 10:45).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni selaku siswa Penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengataka bahwa:

“ Respon nya baik pihak sekolah kepada kami” .(29 Desember 2020 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor selaku siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“tidak tau saya kak”.(29 Desember 2020 17:20).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakann bahwa:

“respon selakolah kepada kami bagus, apalagi sekolah juga sudah membantu mengusulkan nama saya” (29 Desember 2020 17:58).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“saya tidak tau dan tidak paham juga kak”. (29 Desember 17:20).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan:

“ respon untuk KIP sudah bagus saranya untuk KIP agar lebih di optimalkan lagi karena KIP ini masih belum merata masih tedpat siswa yang kurang mampu yang belum mendaopat kan KIP jadi respon pihak sekolah harus di tingkat kan lagi agar membantu meratakan KIP ini”.(23 Desember 2020 09:53)

Hasil observasi dari tanggapan di atas dapat dilihat untuk adanya respon yang jelas di dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Respon yang diterima cukup baik terkait dengan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Tersebut.

6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan Politik

Menurut van metter and van horn Lingkungan sosial, ekonomi dan Politik yaitu hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah lingkungan yang saling berkaitan dan berpengaruh didalam suatu implementasi kebijakan dan juga dapat menjadi sumber masalah apabila lingkungan sosial , ekonomi dan politiknya tidak kondusif. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan informan, berikut ini indikator Lingkungan sosial, ekonomi dan politik meliputi:

1. Komitmen Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar

Komitmen di dalam Pelaksanaan Progran Kartu Indonesia Pintar yaitu mendukung serta ikut bertanggung jawab dalam menjalankan suatu Program dan juga ikut serta mendukung suatu Pelaksanaan Program tersebut. Untuk mengetahui Bagaimana Komitmet Pelaksaan Program Kartu Indonesia Pintar yang dilaksanakan Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan apakah

komitmen pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik maka penulis uraikan hasil wawancara dilapangan dengan informan dan key informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sami'an A.Md selaku Operator sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengataka bahwa:

“ kurang jelas karena dari siswa ada yang tidak membeli kebutuhan untuk keperluan sekolah, tetapi membeli keperluan lain diluar kebutuhan untuk perlenlengkapan sekolah ”.(17 Desember 2020 11:13).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni S.Pdi selaku wakil kepala kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ komitmennya belum sepenuhnya terlaksanakan, soalnya masih ada siswa yang kurang mampu yang belum mendapatkan KIP, tetapi kami pihak sekolah juga akan membantu mengusulkan, kemudian mengenai kesempatan siswa kurang mampu menerima KIP sebenarnya siswa hanya harus ada surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan kemudian kami juga memberikan kesempatan kepada wali kelas masing-masing agar bisa mendata siswa yang tidak mampu ”.
(10 Desember 2020 10:21).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Arafah Astrianingsih S.Pd selaku Bendahara sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan menngatakan bahwa:

“ kurang sesuai komitmen nya untuk sistem penyaluran dana menurut saya harus melibatkan sekolah sehingga jika ada dana yang dibutuhkan untuk sekolah langsung di potong jika tidak melibatkan sekolah akan susah juga pengendaliaannya”. (10 Desember 2020 10:21).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni selaku siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ bagus dan sudah sangat membantu kami yang kurang mampu”. (29 Desember 2020 17:20)

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor selaku siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“menurut saya sudah memuaskan”.(29 Desember 2020 17:20).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ komitmen nya kurang ,semoga kami yang kurang mampu ini segera mendapatkan KIP” (29 Desember 2020 17:58).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ untuk kedepannya semoga pihak sekolah atau pun pemerintah saya bisa mendapatkan KIP dan teman-teman yang kurang mampu yang lainnya juga”. (29 Desember 17:20).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“komitmenya perlu di tingkatkan lagi agar semua nya tepat sasaran dan mereta KIP ini, dan tidak ada lagi siswa yang kurang mampu yang belum menerima KIP ini, kalau masih ada berarti belum maksimal berjalan nya program KIP ini kan, jadi komitmen itu penting setiap kita menjalan suatu program termasuk KIP”.(23 Desember 2020 09:53)

Hasil Observasi dari pernyataan yang disebutkan oleh informan dan key informan dapat dilihat bahwa komitmen didalam pelaksanaan program KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan, belum terlaksanakan dengan baik masih ada di temukannya masalah yang menjadi komitmen tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik masih ada siswa yang kurang mampu yang belum menerima KIP sehingga komitmen dan tanggung jawab di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan kurang efektif.

2. Respon terkait dengan Penerima Kartu Indonesia Pintar

Untuk mengetahui bagaimana respon serta tanggapan terkait dengan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan, karena Respon yang di berikan merupakan hal yang berkaitan

dengan bagaimana pelaksanaan program itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimana Respon terkait dengan Penerima Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan maka penulis uraikan hasil wawancara dengan beberapa informan dan key informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sami'an A.Md selaku Operator sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ Dengan adanya Program KIP ini sangat membantu siswa yang kurang mampu”.(17 Desember 2020 11:13).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Saipul Bahroni S.Pdi selaku wakil kepala kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“respon saya terhadap KIP ini bagus karena bisa di manfaatkan untuk keperluan sekolah seperti membeli buku dan sebagainya menurut saya pemerintah sudah baik dalam membantu masalah pendidikan”. (10 Desember 2020 10:21).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Arafah Astrianingsih S.Pd selaku Bendahara sekolah di Sekolah Menengah Pertama mengatakan bahwa:

“ program bapak jokowi ini sudah bagus dan untuk sistem penyaluran dananya menurut saya sudah bagus juga karena tidak melibatkan sekolah karena

uang itu sensitive jadi sekarang sudah bagus langsung ke bank”. (10 Desember 2020 10:21).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Reni selaku siswa Penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ KIP menurut saya sudah sangat memuaskan, tapi masih ada yang kurang paham cara mengambil uang nya ke bank” (29 Desember 2020 17:20).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Kharisma Khapoor selaku siswa penerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ sangat membantu saya dan keluarga saya, tapi untuk mengambil uangnya agak ribet harus ke bank dan terkadang menunggu kedua orang tua dulu bisa atau tidak nya, atau nunggu pulang bekerja dulu baru bisa” .(29 Desember 2020 17:20).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Mardiana Dwi Novita Sari selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ Harapan saya kedepan nya untuk KIP semoga program nya semakin luas agar makin banyak siswa kurang mampu yang mendapatkan KIP” (29 Desember 2020 17:58).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Tiara selaku siswa yang tidak menerima KIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan mengatakan bahwa:

“ lebih membantu lagi dan lebih teliti lagi dalam mencari siswa yang kurang mampu ” (29 Desember 17:20).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Ali Amran selaku Kepala UPTD Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa:

“Program KIP ini sangat bagus dan sasaran nya juga tetap yaitu siswa yang ekonominya sulit, untuk kedepan nya diperluas bukan hanya untuk siswa yang ada PIP saja, tetap yang kurang mampu yang tidak ada PIP dan KIP juga harus kita bantu dan pihak sekolah mengusulkan harus lebih teliti lagi agar semuanya merata ”. (23 Desember 2020 09:53)

Berdasarkan hasil Observasi yang penulis lakukan dari tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwa program KIP belum merata dan berjalan baik di SMP Negeri 4 Kerumutan. Masih banyak keluhan dari siswa tentang program KIP di SMP Negeri 4 Kerumutan. Namun terhadap program KIP ini mendapatkan Respon yang sangat baik dari sekolah maupun dari siswa dikarenakan program ini memang sangat membantu siswa yang sulit memenuhi kebutuhan sekolah walaupun masih terdapat beberapa keinginan baik dari pihak sekolah maupun siswa untuk program ini kedepannya.

Kesimpulan akhir ataupun hasil Penelitian ini berdasarkan dengan bagaimana kejadian di lapangan bahwa dapat di katakana Implementasi Program

Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik dan kurang maksimal serta terdapatnya masalah-masalah di dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Di sekolah tersebut seperti kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan minimnya pengetahuan siswa terkait dengan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Tersebut serta tidak mengetahui juga apa saja persyaratan yang harus disiapkan untuk mendapat dan mengurus KIP tersebut, dan juga masih belum meratanya Kartu Indonesia Pintar di sekolah tersebut masih ada siswa yang kurang mampu yang belum menerima KIP Serta tidak valid nya data yang di input juga merupakan salah satu penyebab kurang meratanya Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tersebut.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Negeri 4 Kerumutan adalah sebagai berikut:

1. Minimnya sosialisasi terhadap program Kartu Indonesia Pintar ini menyebabkan siswa yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tidak mengerti prosedur pengurusannya
2. Data yang tidak valid terkadang menyebabkan Kartu Indonesia Pintar tidak merata

3. Dalam penyalura Kartu Indonesia Pintar masih banyak siswa tidak paham dalam mengurus syarat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan menghasilkan beberapa kesimpulan yang di peroleh oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis wawancara penelitian serta observasi tentang Implementasin Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Peraturan menteri pendidikan no 12 tahun 2015 tentang program Indonesia pintar yang di tandai dengan KIP serta masih banyak kekurangan-kekurangan dalam kegiatan program Kartu Indonesia Pintar.
2. Hambatan yang terjadi didalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kerumutan ialah data yang tidak valid terkadang menyebabkan Kartu Indonesia Pintar Tidak merata. Kemudian dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar masih banyak siswa yang tidak paham dalam mengurus syarat untuk mendapatka Kartu Indonesia Pintar dan bagaimana Kartu Indonesia Pintar itu sendiri. Dan kurangnya sosialisai kepada siswa terhdap Program Kartu Indonesia Pintar tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. harapkan untuk kedepannya kepada dinas pendidikan, pihak sekolah dan juga pihak yang menyelenggarakan Program Kartu Indonesia Pintar agar dapat dilakukan permutakhiran data untuk penerima Kartu Indonesia Pintar.
2. Kepada pihak sekolah maupun pihak yang menyelenggarakan program Kartu Indonesia Pintar untuk kedepannya agar dilakukan sosialisasi secara berkala sehingga memeberikan edukasi kepada siswa untuk bisa berpartisipasi dalam mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.
3. Kepada pemerintah dan pemerintah daerah, agar lebih banyak memberikan informasi-informasi kepada pihak sekolah ataupun masyarakat mengenai bagaimana program kartu Indonesia Pintar ini berjalan sehingga tidak ada lagi siswa ataupun orang tua siswa yang tidak mengetahui tahapan program Kartu Indonesia Pintar ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman, 2012. *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Aditama, Bandung Sutopo, H.B., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Agustino ,leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Pulik*. Alfabeta: Bandung
- Aziz, A.R, 2019. *Implementasi Intruksi Presiden no 17 2014 Tentang Kebijakan Katu Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidkan Masyarakat*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Global
- Dunn, William N, 2003. *Analisis Kebiakan Publik*. Yogyakarta : Gadjia Mada University Press
- Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert L. Peabody
- Hermينو, D.A, 2018, *Guru Dalam Tantangan Globalisasi*. Malang: Ar-Ruzz Media
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Garindo
- H.M, Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Lexy. J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ismani, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Malang: IKIP Malang.
- Keraf, Gorys, 1994, *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah
- Ndraha, Taqliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ndaraha, Taliziduhu, 2015, *Kibernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta

- Ndraha, Taliziduhu, 2012, *Pengantar teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho Riant, Tilaar 2012, *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press
- Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta
- Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika
- Tresiana, Duadji, 2017. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-Model Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.
- Wahab, Solichim Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Winarno, Budi. 2010. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps
- Zaini, Ali. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas kerja*, Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol UIR.

Dokumentasi

1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1)
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Karu Indonesia Pintar
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau